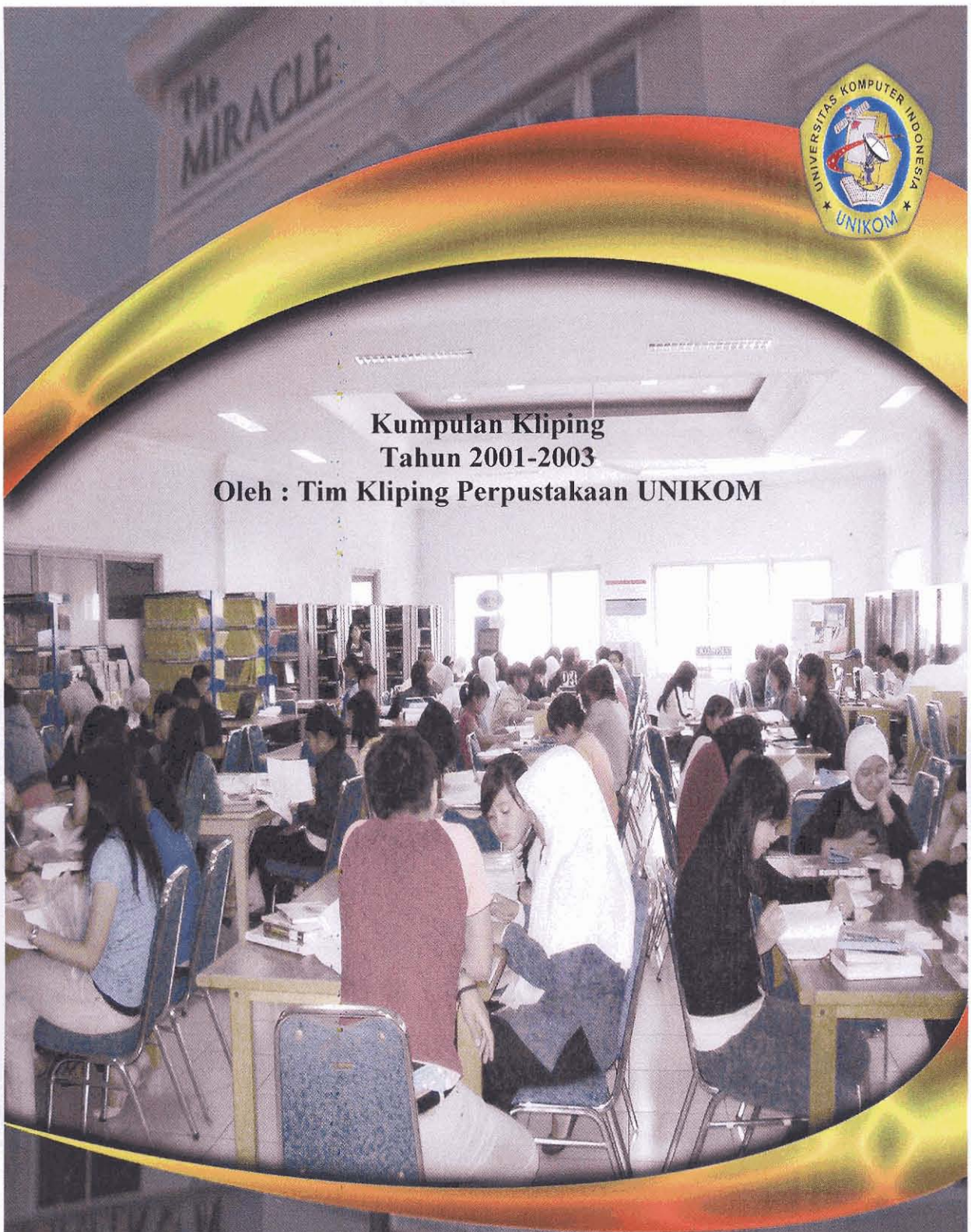


Kumpulan Kliping
Tahun 2001-2003
Oleh : Tim Kliping Perpustakaan UNIKOM

perpustakaan unikom

learning and get friendly with library

gedung 5 lantai 7
e-mail : perpus@unikom.ac.id

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : SENIN / 23 / DESEMBER 2002
Hlm/Kolom : 31 / 1-9
Sumber : Kompas / Pikiran Rakyat /
Penulis : TRIAS KUNCAHYONO
No_Klass/Subjek : PERDAMAIAN / 327

Bethlehem, Arafat, dan Perdamaian yang Pudar

SEPEKAN lalu, Israel, resmi melarang pemimpin Palestina Yasser Arafat pergi ke Bethlehem untuk merayakan Natal. Israel juga memutuskan untuk tetap mempertahankan pasukannya di Tepi Barat sepanjang hari libur Natal.

RAANAN Gissin, seorang penasihat senior untuk Perdana Menteri Israel Ariel Sharon, mengatakan, Arafat dilarang Israel ke Bethlehem pada hari Natal karena "ia tidak cukup berupaya menghentikan serangan teror terhadap warga Israel." Arafat juga dituduh tidak mempunyai niat baik, dan dituduh terlibat di dalam "terorisme."

Padahal, sudah menjadi tradisi, setiap tahun pada hari Natal pemimpin Palestina ini ikut merayakan Natal di kota kelahiran Yesus, di Bethlehem. "Menjadi kewajiban saya untuk berada di sana (Bethlehem, pada waktu Natal)," kata Arafat, dari markasnya yang porak-poranda dihajar dan dikepung pasukan Israel pada tahun-tahun terakhir ini.

Sampai tahun lalu, Arafat selalu ikut merayakan Natal di Bethlehem—kota dengan 30.000 penduduk di mana separuh Kristen dan separuh Muslim—sejak tempat kelahiran Yesus itu diserahkan ke Palestina pada tahun 1995.

Keputusan Israel itu seakan merupakan kelanjutan dari peristiwa April lalu. Ketika itu, tentara Israel dengan mesin perangnya menduduki Bethlehem untuk memburu orang-orang Palestina yang dituduh sebagai teroris. Saat itu, muncul berbagai kecaman dari pelbagi penjuru dunia. Apakah ini merupakan awal dari babak "kegelapan" Bethlehem? Itulah pertanyaan yang muncul saat itu.

Masyarakat dunia tahu bahwa sejak Desember 1995, Bethlehem kembali lagi pada pemiliknya yang sah yakni rakyat Palestina, sesuai dengan Kesepakatan Oslo (1993) setelah sekian lama diduduki Israel.

Dimulai dengan dikeluarkannya Deklarasi Balfour 1917, nasib Bethlehem tidak menyenangkan. Deklarasi ini merupakan peletak dasar terjadinya konflik antara bangsa Arab dengan bangsa Yahudi saat ini.

Deklarasi Balfour ialah surat James Arthur Balfour, Menteri Luar Negeri Inggris pada waktu itu, kepada Baron Rothchild, seorang Yahudi Amerika, yang berisi jaminan dan dukungan Pemerintah Inggris atas dibentuknya suatu negara Yahudi yang akan berkedudukan di Palestina. Dengan catatan: hak penduduk asli di daerah itu dihormati.

Setelah keluarnya Deklarasi Balfour, hingga tahun 1948, Bethlehem dan Palestina berada di bawah pemerintah protektorat Inggris. Selama masa itu, Bethlehem menjadi salah satu pusat perjuangan rakyat Palestina melawan pemerintah kolonial Inggris. Seusai perang Arab-Israel tahun 1948, pasukan Mesir memasuki Bethlehem dan keluar tahun 1949. Sejak tahun itu Bethlehem berada di bawah kekuasaan Yordania hingga Perang Arab-Israel bulan Juni 1967. Dan sejak tahun 1967, Bethlehem berada di bawah pendudukan Israel.

◆◆◆

AKSI militer Israel di Bethlehem dan keputusan melarang Arafat berkunjung ke kota itu, seperti menegaskan kembali betapa kota yang terletak sekitar 9 kilometer sebelah selatan Yerusalem itu memiliki kekuatan yang menggetarkan bagi Israel. Mereka melihat bahwa bila Arafat datang ke Bethlehem maka ia akan memperoleh kembali kekuatan perjuangannya untuk menegakkan kemerdekaan Palestina.

Bethlehem diduga berasal dari nama Bit Ilu Lahama (nama lain dari kota Bethlehem) yang artinya menurut kaum Kan'an adalah makanan dan kekuatan. Latar belakang penggunaan nama itu adalah karena kota tersebut terletak di kawasan subur, tempat gembala hewan ternak dan terdapat banyak ladang gandum, zaitun, dan sayur-sayuran. Kota Bethlehem juga punya nama lain yaitu Kota Afrat atau Afratah yang artinya kesuburan dan tumbuh-tumbuhan.

Dalam sejarah, tercatat gamblang bahwa sejak dulu dari Bethlehem lahir kekuatan "pemberontakan", kekuatan melawan kemapanan dan penindasan. Ketika raja Saul—sekitar 3.000 tahun lalu—berperang melawan serbuan bangsa Filistin dan Amalek, ia mendapatkan bantuan dari prajurit-prajurit Bethlehem. Bahkan, salah satu panglima Saul yang terkenal, yaitu Daud, berasal dari kota itu. Ketika Daud akhirnya menjadi raja Israel, Bethlehem mendapat kedudukan khusus. Kota itu dianggap sebagai kota yang selalu menghasilkan tokoh-tokoh pelawan kezaliman.

Tidak heran bahwa kemudian ketika orang-orang Yahudi dipulangkan dari pengasingan di Babilonia di abad V SM, Bethlehem menjadi tujuan pertama. Dalam pandangan para tokoh keagamaan waktu itu, Bethlehem merupakan kota yang tidak pernah terkena "polusi" budaya penjajah. Cukup mengherankan bahwa karena predikat itu, maka Bethlehem tidak pernah dijadikan pusat kemapanan kekuasaan. Oleh para pembaharu keagamaan Yahudi, Bethlehem bahkan dijadikan semacam titik awal sebuah pemberontakan terhadap kekafiran ibu kota Jerusalem.

Karena dinilai sebagai "kota kelahiran" kaum revolusioner, maka ketika tentara Roma memasuki Palestina sekitar tahun 135 SM, Bethlehem juga dijadikan sasaran gempuran. Pertempuran Bar Kokhba atau yang sering disebut sebagai Revolusi Bar Kokhba (132-135 SM) di bawah kepemimpinan Shimon Bar Kokhba yang terjadi di wilayah itu sering disebut-sebut sebagai salah satu pembuktian bahwa memang dari Bethlehem muncul perlawanan. Ketika itu, Shimon Bar Kokhba memimpin perlawanan melawan penguasa Romawi, Kaisar Hadrian.

Jauh tahun sebelumnya, getaran Bethlehem sebagai kota revolusi juga dirasakan oleh Raja Herodes Agung (73-4 M), lambang kemapanan dan kezaliman. Sejarah mengisahkan, di masa-masa akhir hidupnya, ia selalu merasa terancam terhadap munculnya seorang pemimpin baru.

Siapa saja yang menurut perasaannya dinilai sebagai calon pemimpin, dibunuh begitu saja. Herodes juga membantai bayi-bayi Kota Bethlehem. Itu yang terjadi di waktu kelahiran Yesus. Herodes memang kemudian salah. Pemimpin baru itu ternyata bukan pemimpin politik tetapi pemimpin nilai-nilai nurani baru. Dan terhadap suara nurani, semua memang bisa tergetar.

ITULAH Bethlehem. Dari Bethlehem, manusia diajak untuk menghargai kemanusiaannya, betapa pun lemah dan terbatas kemanusiaan itu. Betapa pun penuh dengan persoalan, kemanusiaan itu bernilai mahal.

Akan tetapi, apa yang terjadi di Timur Tengah hingga saat ini justru sebaliknya: manusia tidak menghargai kemanusiaannya. Mereka saling bunuh. Mereka saling meniadakan kemanusiaannya.

Apakah dari situasi seperti itu akan lahir perdamaian? Pertanyaan itu terus dan terus bergema, namun tidak pernah ada jawabannya. Larangan Israel terhadap Arafat yang ingin merayakan Natal di Bethlehem juga merupakan ancaman terhadap perdamaian.

Damai, memang, telah hilang dari Bethlehem. Wali Kota Bethlehem Hanna Nasser mengatakan, kota yang dihuni 30.000 orang Palestina itu kini mulai kekurangan pangan. Penduduk juga dipaksa tentara Israel untuk tetap tinggal di dalam rumah.

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : ...../...../...../.....
Hlm/Kolom : ...../.....
Sumber : Kompas / Pikiran Rakyat / .....
Penulis : .....
No_Klass/Subjek : ...../.....
.....

"Infrastruktur kami, bangunan-bangunan kami, jalan-jalan dan bahkan lorong-lorong kami telah dihancurkan. Kami tidak mampu memperbaiki lagi karena biayanya jutaan dollar. Apalagi, Israel hanya mencabut jam malam selama beberapa hari," katanya seperti dikutip situs *news.com.au*.

Ironis! Di saat manusia—termasuk Arafat—ingin kembali merayakan Natal, kelahiran Yesus, justru saat itulah Israel meniadakan kemanusiaan manusia. Padahal, makna paling mendalam Natal bagi mereka, umat Kristiani, adalah bahwa Allah mau beserta kita manusia: Allah datang ke dunia ini. Dengan demikian Natal menjadi ungkapan solidaritas Allah dengan manusia.

Menurut kepercayaan kristiani, dalam anak Yesus, Allah menjadi solider dengan manusia, menjadi salah satu dengan kita, senasib sepenanggungan. Ia bersama kita manusia di perjalanan, untuk selamanya. Ia tidak pernah akan meninggalkan kita. Yesus disebut Immanuel, "Allah beserta kita".

Sebenarnya, Arafat juga ingin memberikan contoh solidaritas itu. Dengan datang ke Bethlehem, ia ingin menunjukkan bahwa bangsa Palestina, khususnya, dan bangsa-bangsa di dunia ini pada umumnya, adalah satu; satu ciptaan Allah.

Solidaritas adalah kesediaan untuk berada di samping saudara, menjadi kehadiran baginya yang mendukung. Solidaritas tidak mengandaikan identitas pandangan, tidak berarti bahwa tidak ada salah faham. Akan tetapi, solidaritas adalah sikap yang terbuka, yang memberi semangat. Solidaritas tidak mau menguasai, melainkan membebaskan, ia mendukung saudara agar ia dapat menjadi diri dan merasa aman.

Namun, semua itu tidak ada dalam kamus Israel. Yang ada hanyalah bagaimana meniadakan Palestina. Itulah yang terjadi dan dilakukan selama ini.

Hasilnya adalah pembunuhan dibalas pembunuhan, pertumpahan darah dibalas pertumpahan darah, dan perdamaian pun semakin menjauh tak tergapai. Lingkaran kebencian itu makin kokoh dan tak terputuskan.

Bethlehem pun makin merana, jauh dari perdamaian dan kedamaian. Padahal, bukankah tidak ada yang lebih baik daripada perdamaian, tidak ada yang lebih mulia' dibanding hidup berdampaian secara damai, saling menghormati dan saling menghargai sebagai sesama manusia?

(TRIAS KUNCAHYONO)

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : ...../ ...../...../.....
Hlm/Kolom : ...../.....
Sumber : Kompas / Pikiran Rakyat / .....
Penulis : .....
No_Klass/Subjek : ...../.....
.....



ASSOCIATED PRESS/DAVID GUTTENFELDER

Asap — *Asap mesiu menyelimuti Lapangan Palungan Betlehem, Tepi Barat, Palestina, ketika tentara Israel melakukan operasi militer, April 2002. Tentara Israel mencari orang-orang Palestina yang bersembunyi di Gereja Kelahiran Kristus itu.*

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : KAMIS / 27 / FEBUARI / 2003
Hlm/Kolom : A / 3-6
Sumber : Kompas / ~~Pikiran Rakyat~~ /
Penulis :
No_Klass/Subjek : PERDAMAIAN / 327.1

Oase Perdamaian di Tengah Ambisi Perang

JUTAAN masyarakat di pelbagai penjuru dunia menyerukan perdamaian dan pengakhiran perang. Kalangan agamawan, artis, dan aktivis, tumpah ruah di sudut-sudut kota meminta kepada Pemerintah Amerika Serikat (AS) agar mengurungkan niat menyerang Irak. Bahkan, seorang demonstran di New York melontarkan ungkapan, "Bush bukan gambaran dari mayoritas warga AS." (*Kompas*,17/2)

Demonstrasi kolosal itu benar-benar menunjukkan pemandangan baru dunia, bahwa masyarakat di seantero dunia telah mencapai kesepakatan bersama: pentingnya perdamaian guna menciptakan keamanan dunia. Di tengah santernya isu terorisme dan kekerasan global, masyarakat berkeyakinan perlunya kebijakan politik yang mendinginkan suasana serta mengedepankan aspek keadilan. Melawan terorisme adalah misi bersama yang mesti dikedepankan siapa pun, di mana pun ,dan kapan pun, tetapi menurut para demonstran, kebijakan politik yang tidak memayungi terciptanya suasana damai, justru akan menjadi bumerang bagi upaya melawan terorisme.

Logika itu berbalik seratus persen dengan logika pemerintah AS, yang meyakini pemusnahan nuklir dan senjata biologis merupakan bagian dari paket untuk mewujudkan keamanan dunia.

MAJALAH *Newsweek* edisi spesial 2003 menyebutkan, upaya untuk memusnahkan nuklir dan senjata mematikan merupakan salah satu "doktrin Bush" (*Bush Doctrine*) sejajar dengan kebijakan melawan terorisme. Dalam merespons senjata nuklir, pemerintah AS akan memperluas aliansi, menyelidiki kantung-kantung nuklir, memperkuat kekuatan militer dan menggunakan teknologi modern, termasuk mengembangkan sistem pertahanan atas senjata pembunuh massal. Bagi pemerintah AS, tidak ada pilihan lain kecuali penolakan dan pendudukan (*deterrence and preemption*) atas seluruh senjata nuklir dan pembunuh massal.

Jika logika itu menjadi pijakannya, serangan AS ke Irak tidak bisa ditawar lagi. Fareed Zakaria, kolumnis Majalah *Newsweek*, secara eksplisit menulis beberapa sisi positif serangan AS: Pertama, serangan AS akan berdampak bagi tereliminasinya senjata pemusnah massal. Bila AS bersikap tegas terhadap Irak, setidaknya beberapa negara lain yang mempunyai senjata pemusnah massal akan mendapatkan sanksi serupa.

Kedua, Serangan AS akan memberi kesempatan kepada warga Irak untuk mencicipi kebebasan, terutama bagi kalangan Sunni yang selama ini mendapat tekanan dari Saddam, sehingga dimungkinkan membangun kembali Irak (*rebuilding Irak*) menjadi rezim demokratis.

Ketiga, Serangan AS akan memberi kepercayaan bagi warga Irak guna membangun kembali ekonomi nasional. Industri perminyakan yang selama ini hanya berpusat di istana (*oil-for-palaces*) sebisa mungkin dialihkan untuk kebutuhan pokok masyarakat (*oil-for-food*). Apalagi selama ini, penghasilan ekonomi Irak hanya dihabiskan untuk pembelian senjata.

Keempat, serangan AS akan memberi angin segar bagi perbaikan ekonomi dan politik kawasan Timur Tengah. Kebangkitan Jepang di Asia Timur dari keterpurukan pasca-Perang Dunia II dapat menjadi contoh bagi Irak, bahwa serangan AS akan menjadi modal untuk bangkit dari impitan dan keterpurukan.

Kelima, serangan AS akan memberi pelajaran pada kalangan fundamentalis-radikal dan yang anti-Barat. Mereka akan mendapat pukulan telak dari AS. Jika Osama bin Laden sendiri pernah berkata, kita dihadapkan pilihan untuk memilih kuda yang lemah atau yang kuat, kita pasti memilih kuda yang kuat. Kemampuan AS mengempaskan Irak merupakan peringatan bagi kalangan radikal, bahwa kekuatan ada di pihak AS.

Sekurangnya, inilah yang melandasi ambisi dan kepercayaan AS untuk menyerang Irak. Pemerintah AS tentu telah menimbang-nimbang dan memperhitungkan sisi positifnya. Negara adidaya itu mempunyai segala kekuatan untuk mengambil kebijakan politik.

MESKI demikian, AS dan mereka yang mendukung, sering melupakan dampak negatif serangan itu. Perang AS melawan Irak akan menumpuk sisi gelap sejarah masa lampau, bahwa perang antara Timur dan Barat belum selesai. Saat Timur berkuasa, Barat menikmati kejayaan Timur. Sebaliknya, saat Barat yang berkuasa, yang terjadi justru hiruk-pikuk dan represi terhadap Timur.

Milad Hanna, kolumnis Kristen Ortodoks, dalam tulisannya di harian terkemuka di Mesir, *Al-Ahram*, menyebutkan, rencana serangan AS terhadap Irak hanya akan menambah koleksi sisi gelap sejarah kemanusiaan, bahwa perang kembali dihadirkan sebagai bagian dari kehidupan politik. Perang, sedikit banyak

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : ...../...../...../.....
Hlm/Kolom : ...../.....
Sumber : Kompas / Pikiran Rakyat / .....
Penulis : .....
No_Klass/Subjek : ...../.....
.....

akan mencederai toleransi, pluralisme dan hubungan baik antarpelbagai bagian masyarakat di Timur Tengah, yang disebut dengan "budaya menerima yang lain" (*qabul al-akhar*). Rencana serangan AS ke Irak akan membalikkan sejarah pada "kebencian pada yang lain" (*karahiyat al-akhar*). Demonstrasi besar-besaran di pelbagai kawasan di Timur Tengah akan menambah akumulasi kebencian terhadap Barat, yang belakangan mulai bisa dinetralisir.

Dampak negatif yang lebih besar dari itu adalah ketidakstabilan politik di kawasan Timur Tengah. Ini hanya akan menambah daftar persoalan baru, di tengah persoalan konflik Israel-Palestina yang tak berkesudahan. Rencana serangan AS ke Irak telah memecah konsentrasi dan kepentingan politik kawasan.

Tarik-ulur beberapa pemimpin negara Arab untuk menyetujui dan menolak serangan AS menjadi bukti betapa rumitnya persoalan ini, karena rencana AS menyisakan sejuta problematika yang cukup kompleks bagi kestabilan politik di setiap negara. Akibatnya, dimensi politik lebih dominan daripada dimensi kemaslahatan kawasan Arab secara umum.

Karena itu, bila dalam seminggu terakhir terjadi demonstrasi besar-besaran di lima benua, itu menandakan, perdamaian adalah harga mati. Masyarakat dunia tahu betul dampak negatif akan menyertai serangan AS ke Irak. Bila tadi disebutkan sederetan sisi positif perang, sebenarnya tak lebih sebagai sisi positif yang sulit diukur. Dan tidak ada jaminan dari siapa pun, perang akan menyudahi kemelut yang dihadapi Irak saat ini.

Reaksi penolakan masyarakat Irak terhadap serangan AS cukup membuktikan, bahwa masyarakat Irak cukup solid dalam merapatkan barisan. Reaksi itu bisa dipahami dari tradisi kebanyakan masyarakat Arab, bahwa mempertahankan identitas merupakan ritualitas mereka, baik dalam beragama, berbangsa maupun bernegara.

Masyarakat Arab, termasuk Irak, pascaruntuhnya dinasti Ottoman di Turki, membentuk nasionalisme yang dibangun di atas identitas lokal. Masyarakat Irak tidak akan mau menjual harga diri kepada orang lain. Dalam kondisi terjepit apa pun, mereka akan memilih hidup dan mati sebagai orang Irak.

Di sinilah, pesan perdamaian mesti diangkat ke permukaan. Perdamaian yang diusung pelbagai lapisan masyarakat, termasuk agamawan, artis, dan politisi menunjukkan perdamaian merupakan agenda bersama yang tk bisa ditunda. Masyarakat dunia merindukan oase perdamaian hadir di tengah eskalasi kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia. Perdamaian, tentu saja, tk bisa dibuktikan hanya dengan demonstrasi dan aksi jalanan belaka, melainkan harus ada *political will* dari pemerintah AS untuk mengambil langkah alternatif yang mara bahayanya lebih sedikit (*akhaff al-dlararayn*).

Pemerintah AS, sejatinya bisa menangkap perdamaian sebagai bagian dari apa yang dicitakan-citakan AS selama ini untuk mewujudkan stabilitas dunia, demokratisasi, dan kehidupan yang berkeadaban.

ZUHAIRI MISRAWI
Alumnus Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir.

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : MINGGU / 22 / NOPEMBER / 2002
Hlm/Kolom : 15 / 1-6
Sumber : Kompas / Pikiran Rakyat /
Penulis : M RIDWAN KAMIL
Subjek /NO. KLASS : POLITIK / 320

Wajah Kota dalam Politik Identitas

"HARUS Jakarta!" ujar Bung Karno suatu hari.

Di bawah terik lapangan Ikada, di hadapan sekelompok pemuda antusias, ia berpidato tentang mengapa Jakarta harus menjadi ibu kota Indonesia. "Bukanlah Surabaya yang kotanya orang Madura dan Jawa." Bukan pula Bandung, sebesar-besarnya Bandung, itu adalah kota Sunda." Di mata Bung Karno, hanya Jakarta yang layak dikedepankan sebagai Ibu Kota dan etalase identitas bagi Indonesia baru. Lainnya hanyalah kota-kota daerah.

Bung Karno ingin Jakarta menjadi *"The beacon of New Emerging Forces"*. Bung Karno yang pada dasarnya ingin harga diri bangsa Indonesia terangkat setelah hancur dalam era kolonialisme, sempat memimpikan Jakarta sebagai yang terbesar, terdepan, dan termegah. "Lihatlah New York atau Moskwa," tunjuknya.

Dan, kita pun tahu ke mana obsesi berlanjut. Tanah Senayan digerus dan 5.000 keluarga dipindah untuk pembangunan kompleks stadion olahraga terbesar. Ruas Jalan Thamrin dan Semanggi dihamparkan sebagai koridor bisnis. Masjid Istiqlal dibangun sebagai yang termegah dan tugu Monas yang monumental pun ditegakkan.

MENGAPA konsep beridentitas sebegitu penting?

Identitas adalah cara menjaga "karakter" dan "sifat beda" kita. Mulai dari gaya hidup, strata sosial, agama, usia, ras/etnis, bendera kelompok, sampai orientasi seksual umumnya menjadi referensi penting dalam eksistensi identitas. Dan untuk memahaminya, kita biasanya perlu cermin pembanding. Kehadiran "mereka" atau *"other"* sebagai pembanding yang berbeda menjadi penting untuk memahami siapakah gerangan "kita" atau *"self"*.

Perdebatan tentang "Barat" dan "Timur" adalah contoh klasik. "Barat" sering kita pahami sebagai sekelompok bangsa yang berada di luar kita, yang dulu pernah hadir sebagi pendatang dan menjajah kita. Kepada cermin bernama "Barat"-lah sering kita mematut diri, apakah kita lebih baik atau buruk, apakah mengikuti atau menjauhi.

Kelompok yang merasa dirinya lebih baik, cenderung menjadikan dirinya sebagai referensi dan secara sepihak menegasikan identitas di luar dirinya. Max Weber dalam *The City* pada tahun 1921 merumuskan identitas masyarakat urban dunia dalam dikotomi "Occidential vs Oriental". Baginya, identitas "Occidental" alias "Barat" tadi eksis sebagai kebalikan dari yang menjadi ciri "Oriental". Dan ketimbang memahami "Timur" sebagai segugus sistem hidup yang saling melengkapi, "Barat" malah mengukuhkan identitasnya dengan melabeli "Timur" dengan segala keburukannya.

Persis seperti yang dilakukan psikiater Belanda PH Travaglino, yang menyimpulkan pada tahun 1920, seperti dikutip Goenawan Mohamad, bahwa identitas orang Jawa dewasa umumnya tidak memiliki kematangan psikologis dan masih bersifat *kinderlijk niveau* alias kekanak-kanakan. Kajian ilmiah yang dipakai Belanda sebagai pembenaran untuk memperpanjang kolonialismenya di Indonesia. Sebuah cara pandang filosofis yang dicoba dilawan dalam diskursus poskolonial.

CITY air makes you free, cetus pepatah Jerman kuno. Ini karena kota adalah artefak terbesar dari aspirasi budaya manusia. Struktur dan wajah kota pun bisa bercerita tentang kompleksitas persilangan identitas masyarakatnya.

Yang paling mencolok sekaligus tak terasa adalah bagaimana kapitalisme mendeformasi struktur dan wajah kota berdasarkan strata kelas sosial. Kaum miskin kota umumnya tinggal di tempat kumuh dan sumpek, sementara kaum berpunya tinggal di lokasi mahal dan berdensitas rendah. Teori lokasi ini biasanya sebangun dengan strata sistem produksi ekonomi kapitalis yang dianutnya. Akibatnya, konsep sosial *mixed income & mixed density* seperti di Bijlmermerr, Belanda, tahun 1992 atau di kota-kota Skandinavia lainnya menjadi konsep yang terasa asing.

Melipat ruang kota sebagai komoditas, gejala *gated-community*, dan sub-urbanisasi adalah jejak lazim kapitalisme dalam wajah kota. Puluhan perumahan berskala raksasa di sekeliling Jakarta, ruang hijau kota yang disulap menjadi Mal Taman Anggrek atau Kelapa Gading Sports Center adalah cerminan bagaimana akumulasi dan spekulasi kapital terhadap ruang begitu dominan dan mencengkeram. Fenomena kapitalisme kota ini sering dikaji kelompok "Marxian Urbanism" yang melihat kota sebagai arena konflik antarkelas sosial seperti dirintis Manuel Castells sejak "The Urban Question" pada tahun 1977.

Sementara itu, cara negara memproduksi identitas kolektif melalui arsitektur atau desain urban seperti Soekarno, juga terjadi di Mesir pada era Anwar Sadat. Dia juga terobsesi menampilkan identitas Cairo yang baru ke hadapan dunia. Dengan slogan *open-door policy* atau *infitah*, Sadat menghancurkan dan mengusir belasan ribu jiwa dari jantung Kota Cairo untuk proyek mega atas nama modernisasi dan dollar turisme internasional. Jerman pada era Hitler pun sempat merencanakan hal serupa. Dia dibantu arsitek Albert Speer sempat merencanakan untuk merckonstruksi Berlin dalam skala raksasa dan menggunakan ruang kota sebagai alat disiplin dan intimidasi identitas "Germania". Soekarno, Sadat, dan Hitler memang sama-sama terobsesi menjadikan wajah kota sebagai etalase politik identitas. *"A City of parades and spectacles,"* komentar Peter Hall.

Identitas kelompok berdasarkan ras dan etnis pun masih banyak ditemui dalam struktur kota yang seharusnya bersifat kosmopolitan. Chinatown atau Pecinan adalah contoh identitas ras yang hadir di banyak kota besar dunia. Little India dan Arab Street di Singapura, Harlem untuk kulit hitam dan Little Italy untuk imigran Italia

di Manhattan adalah contoh segregasi komunitas kota berdasarkan ras.

Di Indonesia lain lagi. Di sini keyakinan beragama pun bisa hadir sebagai identitas lingkungan binaan. Griya Islami dan Vila Ilhami di Tangerang, Telaga Sakinah di Bekasi dan Taman Firdaus di Bogor adalah contoh perumahan yang membawa nama Islam atau "suasana Islami". Ini unik. Walaupun hidup di negeri dengan 80 persen pemeluk Islam, ternyata eksistensi identitas beragama masih harus dikukuhkan juga melalui fisik religius lingkungan binaannya. Namun, sebagian fenomena ini ternyata hanyalah taktik bisnis belaka. "Griya Islami" diubah lagi oleh pengembangnya menjadi nama biasa dengan alasan takut terjadi peristiwa yang "tidak Islami" yang diyakini akan menurunkan nilai jual proyek mereka.

Sementara di Amerika atau Eropa, lapisan identitas masyarakat berdasarkan gaya hidup atau orientasi seksual juga banyak terekam. Kelompok dengan gaya hidup seniman atau bohemian bisa ditemukan di distrik Soho di London, Greenwich Village di Manhattan, Telegraph di Berkeley, atau Garcia di Barcelona. Sementara Oxford Street di Sydney atau distrik Castro di San Francisco sekarang mungkin menjadi lokasi komunitas terbesar dunia bagi kaum *gay* dan lesbian. Dan, untuk mengklaim eksistensi identitas mereka, biasanya acara *gay parade* dijadikan ritual utama tahunan, terutama di San Francisco, Manhattan dan Sydney sebagai agenda politik.

Gerakan feminisme pun tidak ketinggalan. Jane Jacobs dan Dolores Hayden memotori gerakan moral untuk meredefinisi kota-kota Amerika yang cenderung berorientasi patriarkis. Jarangnya fasilitas penitipan anak, transportasi urban yang tidak nyaman, dan desain hunian urban yang tidak *defensible* menyebabkan banyak perempuan kesulitan beraktivitas produktif seperti halnya kaum lelaki. Di sisi lain, mereka juga menganggap sub-urbanisasi berhasil "membuang" kaum perempuan untuk duduk mengurusi rumah tangga semata. Gerakan ini sempat menghentikan program *urban renewal*, membuat masyarakat mempertanyakan kembali konsep sub-urbanisasi dan mengangkat pentingnya isu feminisme dalam konteks kota di Amerika.

LAPIS demi lapis karakter identitas yang hadir di kota haruslah dibaca sebagai keanekaragaman yang memperkaya budaya dan memperunik wajah kota. Berbeda bukan berarti ancaman. Berbeda adalah pluralitas keunikan. Mulai dari kerusuhan antarkampung di Jakarta, antaretnis di Kalimantan, sampai "perang agama" di Maluku adalah cermin bagaimana narsisime identitas yang berlebihan hanyalah membawa petaka dan bala. Kita bisa hidup lebih baik dengan mengencangkan toleransi identitas dan menggunakan kota sebagai laboratoriumnya. Dan, mudah-mudahan pula kita tidak terjerumus dalam pengotakan identitas yang berlebihan, apalagi dibarengi ancaman seperti yang sempat diteriakkan George Bush secara menggelikan, *"You are either with us or againts us!"*

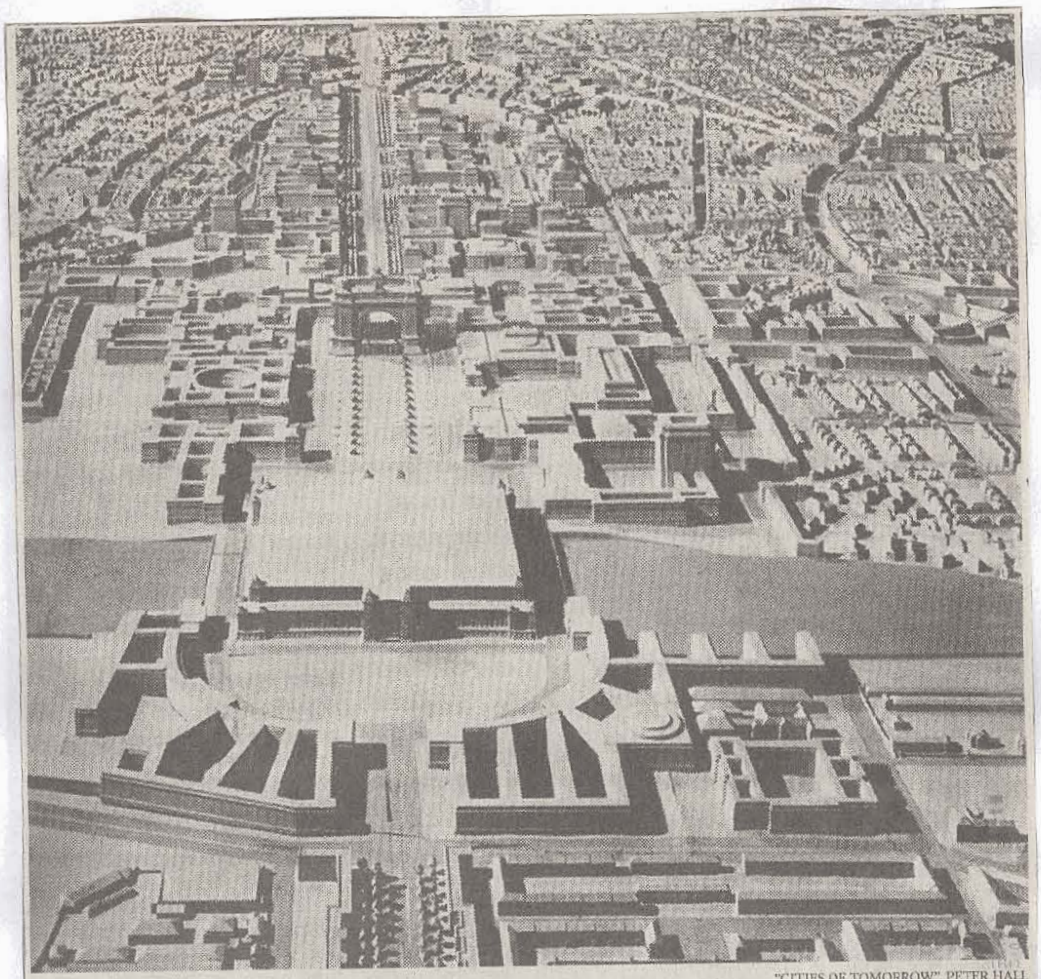
M RIDWAN KAMIL
Arsitek dan perencana kota di Skidmore, Owings & Merril (SOM), Hongkong

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : ...../ ...../...../.....
Hlm/Kolom : ...../.....
Sumber : Kompas / Pikiran Rakyat / .....
Penulis : .....
Subjek : .....



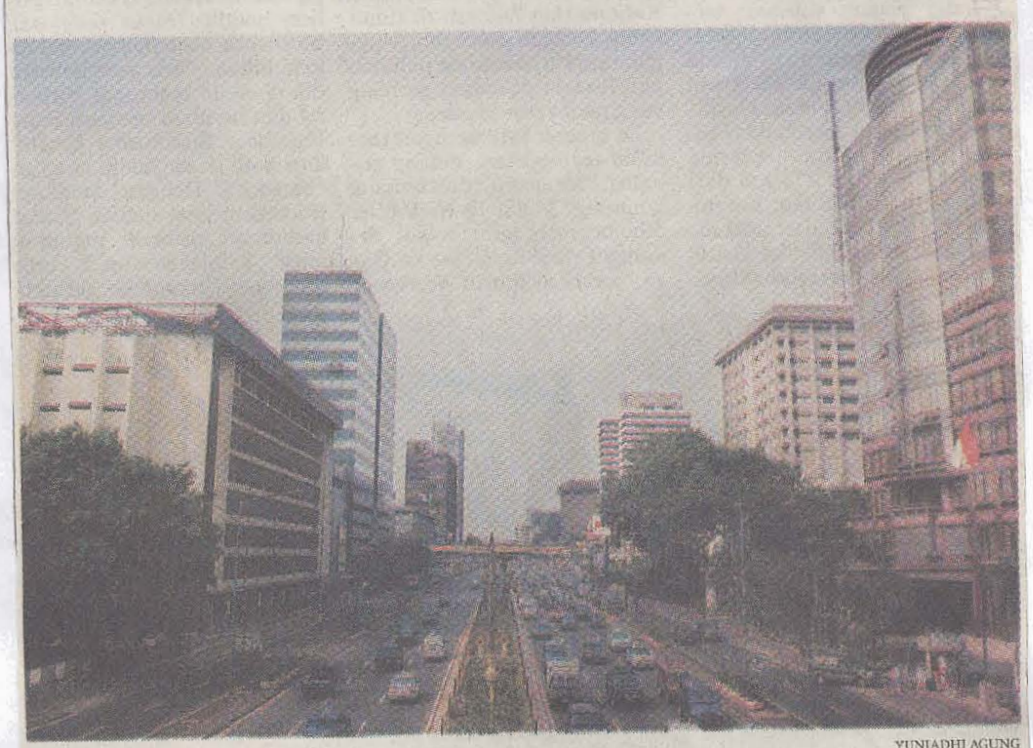
SATRIO NUSANTORO

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : ...../...../...../.....
Hlm/Kolom : ...../.....
Sumber : Kompas / Pikiran Rakyat / .....
Penulis : .....
Subjek : .....



"CITIES OF TOMORROW", PETER HALL

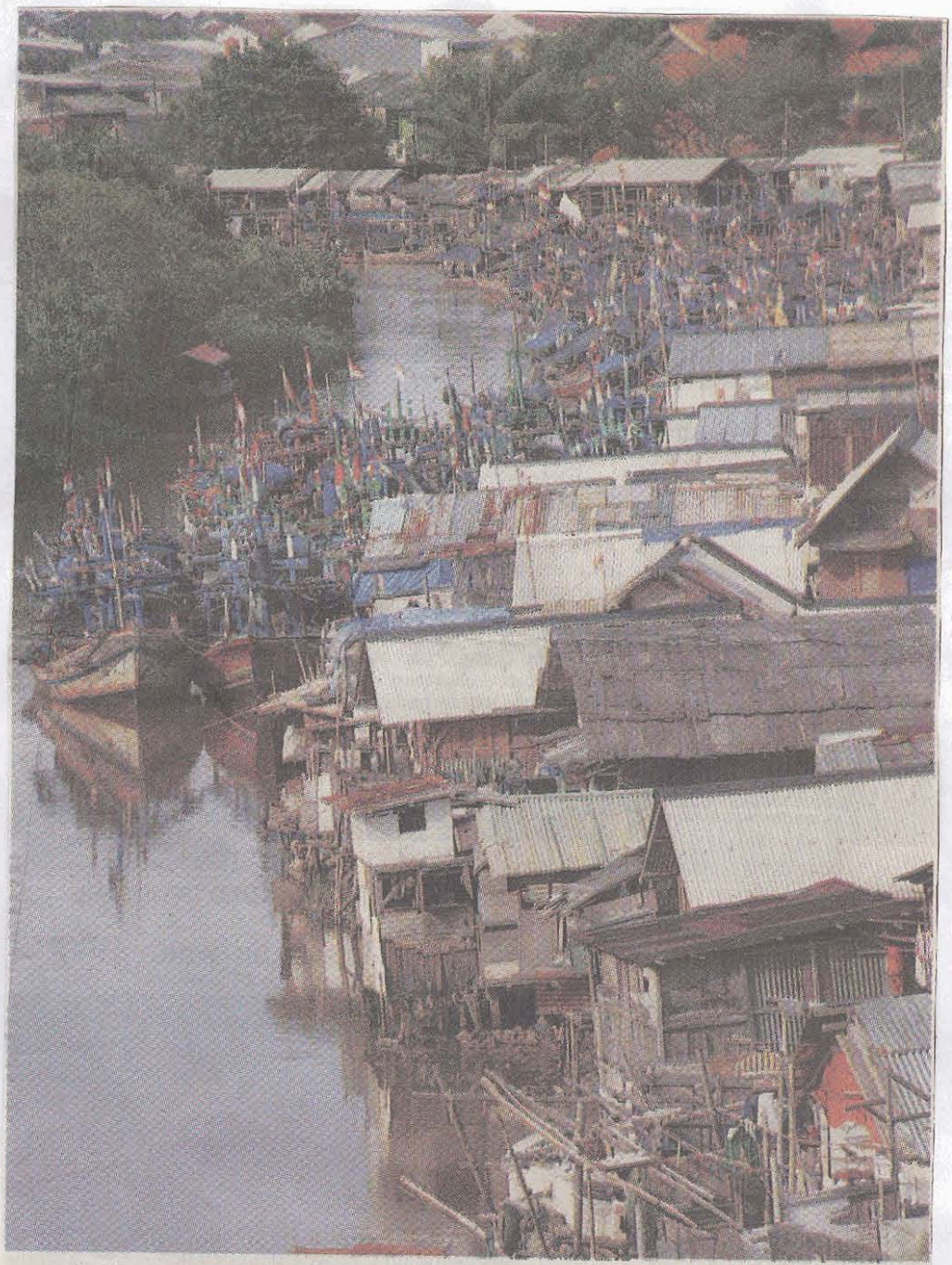
Berlin — *Rencana rekonstruksi Berlin sebagai alat politik identitas baru "Germania".*



YUNIADHI AGUNG

Kawasan Thamrin — *Kawasan Jalan Thamrin, Jakarta Pusat, menjadi koridor kegiatan ekonomi.*

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : ...../...../...../.....
Hlm/Kolom : ...../.....
Sumber : Kompas / Pikiran Rakyat / .....
Penulis : .....
Subjek : .....



KOMPAS/EDDY HASBY

Kapitalisme — *Identitas lingkungan binaan berdasarkan strata sosial sebagai dampak ketimpangan ekonomi kapitalis.*

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : JUMAT / 02 / AGUSTUS / 2002
Hlm/Kolom : 7 / 1-3
Sumber : Kompas / Pikiran Rakyat /
Penulis : DR. TODUNG MULYA LUBIS
Subjek /NO. CLASS : POLITIK / 320.3

Wajah Indonesia Baru

Pemilihan Presiden Langsung

(DR TODUNG MULYA LUBIS, *Dewan Pendiri Centre For Electoral Reform=Cetro)*

IHWAL pemilihan presiden langsung hampir menggiring kita kepada kebuntuan keseluruhan proses perubahan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Beberapa fraksi terutama Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) dan Fraksi TNI/Polri menolak pemilihan presiden langsung dan ini ditambah pula dengan gerilya politik dari berbagai kelompok yang tidak saja menolak pemilihan presiden langsung, tetapi lebih jauh justru ingin kembali kepada UUD 1945 tanpa perubahan sama sekali.

Tak terbentuknya Panitia Khusus DPR untuk penanganan kasus Badan Urusan Logistik (Pansus Bulog II) pernah diisukan sebagai bagian dari dagang sapi antara PDI-P dengan Partai Golkar yang saling butuh dukungan; PDI-P untuk menjegal pemilihan presiden langsung sedangkan Golkar untuk mengamankan dirinya dari malapetaka gugatan pembubaran, jika dana Bulog tersebut terbukti mengalir ke pundi-pundi Golkar. Sejauh mana isu itu benar, sukar untuk diketahui. Yang pasti, *marriage of convenience* itu terjadi antarsesama partai untuk isu-isu tertentu. Tentu hal ini sah saja, tetapi ketika perkawinan itu sudah membelakangi janji-janji reformasi, maka perkawinan itu dengan seketika berubah menjadi perselingkuhan.

Belakangan ini dalam pembicaraan lintas fraksi tampaknya isu pemilihan presiden langsung ini sudah mencapai titik temu: mayoritas fraksi setuju agar pemilihan presiden dilaksanakan secara langsung, termasuk pemilihan presiden babak kedua. Jadi, tidak dikembalikan kepada MPR seperti yang dikehendaki oleh F-PDIP sebelumnya. Dengan demikian, Pasal 6A Perubahan Ketiga UUD 1945 tinggal ditambah dengan satu ayat yang mensyaratkan bahwa dalam hal tak ada calon presiden yang berhasil memperoleh suara lebih dari 50 persen pada pemilihan babak pertama, maka dua calon yang memperoleh suara terbanyak akan maju ke pemilihan babak kedua. Meskipun terlalu pagi untuk bersenang hati karena harus menunggu hasil resmi Sidang Tahunan (ST) MPR ini, namun tidak berlebihan jika kita mencatat kesepakatan itu sebagai suatu tonggak *achievement* yang penting, yang akan membuka babak baru dalam sejarah politik negeri ini.

Betapa tidak, karena jika pemilihan presiden langsung ini jadi dilaksanakan, maka inilah pemilihan presiden langsung yang pertama dalam sejarah negeri ini karena baik Soekarno, Soeharto, BJ Habibie, Abdurrahman Wahid, maupun Megawati tak ada yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Wajah Indonesia Baru yang diimpikan banyak orang mulai terukir dan kita pun secara pasti meninggalkan masa lalu yang tidak demokratis.

Mengapa pemilihan presiden langsung ini tak bisa ditawar? Kalau kita bicara tentang kedaulatan rakyat maka pemilihan presiden langsung ini adalah wujud dari pelaksanaan kedaulatan rakyat tersebut. Hampir setiap presiden terpilih di Amerika, misalnya, seusai dengan pemilihan presiden mengatakan, *peoples have spoken*. Inilah sumber legitimasi tak terbantahkan dari setiap presiden terpilih.

Indonesia mengambil model Nigeria, maka suara yang lebih dari 50 persen tersebut sedikitnya 20 persen adalah suara yang berasal dan tersebar di lebih dari separuh jumlah provinsi yang ada. Ini untuk membuktikan bahwa sang presiden terpilih itu memperoleh dukungan yang luas dari berbagai lapisan masyarakat di sebagian besar negeri ini. Jadi, tidak hanya didukung oleh pemilih di Jawa saja, misalnya.

Sistem pemilihan presiden langsung yang bakal kita adakan ini adalah sistem yang relatif lebih baik dari sistem lainnya. Sistem *first past the post* sering melahirkan apa yang dikenal sebagai presiden minoritas (*minority president*) karena hanya dipilih oleh sejumlah kecil rakyat, sehingga pemerintahannya lemah. Lihat apa yang terjadi pada Estrada di Filipina yang terguling karena basis dukungan yang lemah. Sistem *preferential voting*, meski demokratis, tetapi mensyaratkan pendidikan politik yang memadai, pemilih maupun petugas pemilihan umum. Sistem *run-off (two round system)* murni bisa menguntungkan daerah yang padat penduduknya, sehingga dalam konteks Indonesia akan dirasakan merugikan pemilih luar Jawa. Sementara sistem *electoral college* seperti yang diterapkan di Amerika potensial bisa merugikan calon presiden yang memperoleh suara populer lebih banyak karena kalah pada suara *electoral*. Hal ini dialami oleh Al Gore yang memperoleh suara lebih banyak dibandingkan Bush, tetapi karena Bush memperoleh *electoral college* yang lebih banyak maka Bush terpilih menjadi presiden.

Ada yang mengatakan bahwa rakyat kita belum siap. Alasan konyol ini gampang dipatahkan karena selama ini rakyat kita itu selalu siap seperti pada Pemilu 1999. Justru sebaliknya, banyak elite politik kita yang tak pernah siap. Ada pula alasan yang mengatakan bahwa pemilihan langsung ini sangat mahal. Hal ini sukar dibantah, tetapi siapa bilang kedaulatan rakyat itu murah?

Namun, kalau kita berpikir lebih jauh, kita mungkin akan menerima biaya mahal itu ketimbang membiarkan pemilihan itu dilakukan di MPR dengan risiko *money politics* yang justru biayanya bisa jadi lebih banyak. Sementara kalau *money politics* pada pemilihan presiden langsung terjadi, maka bisa dibayangkan bahwa calon presiden mana pun akan tak kuasa menabur uang seenaknya kecuali kalau calon presiden tersebut mempunyai mesin cetak uang palsu.

Kita memang belum tahu apakah kesepakatan pemilihan presiden langsung akan lolos atau tidak karena bukan mustahil dijegal pada saat-saat terakhir. Kita juga tak tahu apakah gerilya politik di ST MPR akan menghasilkan formula baru mengikuti usul yang pernah disampaikan Fraksi Partai Golkar atau Fraksi PKB. Pokoknya masih terlalu pagi untuk berpesta. Sekarang ini kita hanya bisa bersyukur bahwa wacana menuju demokrasi partisipatoris berembus sangat kencang di seluruh pelosok negeri ini.

Semoga semuanya berjalan mulus, termasuk nantinya ketika RUU Pemilu dibahas di DPR karena pertarungan masih jauh dari selesai. Harus dijaga bahwa jangan sampai RUU Pemilu menjadi *deadlock* dan pemilihan presiden langsung itu tertunda sampai tahun 2009. Kalau ini terjadi, kita akan malu dengan kegagalan dan ketidakberdayaan yang sudah berjalan lebih dari setengah abad ini. Jangan-jangan kita mesti belajar kepada saudara kita di Timor Timur yang sudah berhasil melaksanakan pemilihan presiden langsung.

Perpustakaan Unikom

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : JUMAT / 7 / MARET / 2003
Hlm/Kolom : 1 - 11 / 1 - 2 / 8 - 9
Sumber : Kompas / ~~Pikiran Rakyat~~ /
Penulis :
No_Klass/Subjek : DEMONSTRASI / 322.42

Ribuan Pelajar AS Protes Perang Irak

WASHINGTON, KAMIS — Rabu (5/3) siang lalu, ribuan pelajar dan mahasiswa Amerika Serikat (AS) beramai-ramai meninggalkan kelas mereka untuk turun ke jalan dan menentang keras rencana AS melancarkan serangan ke Irak.

Sementara itu, AS semakin mematangkan rencana persiapan perangnya setelah mendapat laporan bahwa Irak masih menyembunyikan beberapa senjata terlarang. Sedangkan Irak kembali menghancurkan enam rudal Al-Samoud II.

Meskipun AS bersiap perang, negara adidaya itu setuju memberi kesempatan kepada Presiden Irak Saddam Hussein, yang diperkirakan hingga 17 Maret, untuk menghancurkan senjata pemusnah massal.

Perancis, Rusia, Jerman, dan Cina tetap menentang penggunaan kekuatan senjata ke Irak. Jumat ini, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) akan mendengar laporan lanjut dari Tim Pemeriksa Persenjataan PBB di Irak.

Koalisi Nasional Perdamaian Siswa dan Pemuda AS, selaku koordinator unjuk rasa itu, mengatakan, lebih dari 300 sekolah dan universitas di AS terlibat dalam aksi tersebut. Ribuan siswa lain juga melakukan arak-arakan di Inggris, Swedia, Spanyol, Australia, dan Mesir.

"Kami berjalan ke luar meninggalkan kelas kami karena sangat tidak bisa diterima jika siswa-siswa di Irak, yang sebenarnya persis sama dengan kami, harus menghadapi konsekuensi perang secara unilateral," kata juru bicara (jubir) Koalisi Amanda Flott.

"Juga, ketika semua siswa berusaha mendapatkan pendidikan lebih tinggi, membengkaknya anggaran militer justru akan mengurangi anggaran pendidikan, dan semua itu untuk mendukung perang yang di mata kami tidak dapat dibenarkan," katanya.

Di Universitas Stanford, California, pengunjuk rasa berkeliling di seputar kampus sambil membawa plakat bertuliskan "Ini Timur Tengah, Bukan *Wild West*" dan "Mayoritas dari Kami Tidak Memilih Perang".

Beberapa guru dan dosen di beberapa sekolah dan universitas itu mendukung tindakan mereka. Terutama ketika mereka mengizinkan para siswa meninggalkan kelas dengan tenang.

Walaupun begitu, ketika menerima Jenderal Tommy Franks, Komandan Sentral AS yang dipercaya memimpin operasi di Irak, Presiden AS George W Bush justru mematangkan rencana serangan. Keputusan itu diambil setelah mendengar laporan bahwa Irak masih menyimpan beberapa senjata terlarang.

Kepada Bush, Tommy Franks menegaskan, seluruh pasukan dalam kondisi siap siaga. "Pada kesempatan itu Franks didampingi Menteri Pertahanan (Menhan) Donald Rumsfeld, Menteri Luar Negeri (Menlu) Colin Powell, Panglima Angkatan Udara (AU) Jenderal Richard Myers, dan Wakil Menhan Paul Wolfowitz.

Irak sendiri hingga saat ini tetap menunjukkan kesediaannya bekerja sama dengan PBB. Setelah menghancurkan enam rudal Al-Samoud yang dilakukan sejak hari Sabtu lalu, kemarin PBB melaporkan bahwa Irak kembali menghancurkan enam rudal Al-Samoud II di bawah pengawasan langsung PBB.

"Tim kami terus menghancurkan rudal Al-Samoud II ini," kata jubir PBB di Irak, Yasuhiro Ueki. Namun, ia belum bersedia membeberkan jumlah total rudal yang sudah dihancurkan.

Meskipun demikian, salah satu sumber menyebutkan, sejak Sabtu lalu Irak telah menghancurkan 28 rudal Al-Samoud II dengan buldoser dan dalam pengawasan langsung PBB. Pejabat Irak mengatakan, Irak telah memproduksi 100 rudal Al-Samoud II.

Rabu kemarin, ketika bertemu para pejabat militer, Presiden Irak Saddam Hussein mengatakan, kelebihan jangkauan ledak rudal Irak tersebut hanya 10-12 kilometer dari batas maksimal PBB, yaitu 150 kilometer. "Bisakah rudal tersebut menjangkau Israel? Bisakah rudal itu menjangkau AS?" katanya.

Menurut Colin Powell, belum ada tanda kesungguhan Irak untuk menghancurkan seluruh senjatanya. Intelijen AS melaporkan, Irak m[redacted]nyikan berbaga[redacted]

di seluruh negeri untuk menghindari pemeriksaan PBB.

"Tidak ada satu pun yang kami lihat... mengindikasikan Saddam Hussein telah mengambil keputusan politik yang strategis untuk melucuti senjatanya," ujar Powell.

"Sekali lagi, ia kembali memulai permainan yang telah ia mainkan 11 tahun lalu," kata P[redacted] ketika berpidato di depan Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Washington.

Namun, kemarin AS-Inggris dilaporkan sedang mempersiapkan kemungkinan memberikan kesempatan lebih panjang kepada Saddam Hussein.

Sumber di PBB mengatakan, AS akan coba meyakinkan DK bahwa masih ada "peluang" sebelum mereka benar-benar melancarkan serangan. Media Inggris melaporkan, Perdana Menteri Inggris Tony Blair merupakan tokoh di balik layar yang sedang mempersiapkan dokumen kompromi. Hingga saat ini AS-Inggris hanya mendapat dukungan dari Spanyol.

Sementara Perancis, Rusia, dan Jerman tetap bersikeras menolak penggunaan senjata ke Irak. Komitmen ketiga negara itu mereka kukuhkan dalam pertemuan darurat di Paris, Selasa lalu. Rusia dan Perancis telah sepakat untuk menggunakan hak veto.

Sedangkan Cina menegaskan, resolusi II tentang Irak sama sekali tidak perlu.

(AFP/AP/REUTERS/RIE)

Perpustakaan Unikom



ASSOCIATED PRESS/JOE KACZMAREK

Demo Antiperang Irak di AS — *Para demonstran antiperang Irak menutup jalan di salah satu perempatan jalan di Philadelphia, Amerika Serikat (AS), di dekat pusat perekrutan personel angkatan bersenjata. Para demonstran antiperang yang terdiri dari pelajar sekolah menengah umum dan mahasiswa itu membentuk lambang perdamaian. Demo antiperang tersebut merupakan salah satu demonstrasi terbesar setelah demonstrasi menentang perang Vietnam di masa lalu.*

UNIKOM
Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : ...../...../...../.....
Hlm/Kolom : .....
Sumber : Kompas / Pikiran Rakyat / .....
Penulis : .....
No_Klass/Subjek : ...../.....
.....
.....
.....

hlm

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : KAMIS / 6 / MARET / 2003
Hlm/Kolom : 1 & 11 / 1-5
Sumber : Kompas / ~~Pikiran Rakyat~~ /
Penulis :
No_Klass/Subjek : DEMONSTRASI / 322.42

OKI Menolak Total Serangan AS ke Irak

DOHA, KOMPAS — Negara-negara anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI) satu suara dalam menolak total serangan Amerika Serikat (AS) terhadap Irak. Sikap tegas itu diputuskan dalam komunike yang dikeluarkan pada akhir Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) darurat OKI di Doha, Qatar, Rabu (5/3). Bukan itu saja, dalam komunike itu, selain menolak total setiap serangan terhadap Irak, ke-57 negara anggota OKI juga menolak setiap ancaman terhadap keamanan Islam yang mana pun.

Komunike itu juga menyerukan kepada seluruh anggota OKI untuk menahan diri dengan tidak mengambil bagian dalam aksi militer apa pun yang ditujukan kepada keamanan dan integritas teritorial Irak dan negara anggota OKI lainnya. Demikian dilaporkan wartawan *Kompas* **Musthafa Abd Rahman** dari Doha semalam.

Sementara itu, dalam pertemuan darurat Menteri Luar Negeri (Menlu) Perancis, Rusia, dan Jerman di Paris, Perancis, mereka secara tegas menolak rencana serangan militer ke Irak. Sejalan dengan itu, Paus Yohanes Paulus II pun semakin mendesak seluruh pemimpin dunia untuk menghindari konflik Irak. Sebaliknya, AS dan Inggris semakin mendesak Dewan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) untuk segera menyetujui kerangka resolusi yang memungkinkan serangan ke Irak.

KTT darurat OKI yang digelar untuk menghadapi ancaman serangan militer (AS) dan sekutunya dibuka oleh Emir Qatar Sheikh Hamad bin Khalifah Al Thani — yang menjabat kepemimpinan bergilir OKI, yang beranggotakan 57 negara. Jalannya KTT darurat OKI itu sempat terganggu oleh ketegangan antara Irak dan Kuwait menyusul kedua pihak saling tuduh.

Ada dugaan komunike mendukung Irak tersebut dibuat sekadar untuk menyenangkan Irak mengingat Qatar, Ketua OKI saat ini dan tuan rumah KTT darurat OKI, serta Kuwait diperkirakan akan menjadi basis serangan AS terhadap Irak. Qatar diperkirakan akan menjadi pusat komando dalam serangan AS ke Irak, sedangkan Kuwait saat ini menampung hampir 140.000 personel militer AS dan Inggris. Beberapa negara Teluk lain juga menampung personel militer AS.

Menyinggung ancaman AS untuk menggulingkan Presiden Irak Saddam Hussein dan menata kembali peta Timur Tengah, para pemimpin OKI menentang setiap usaha untuk memaksakan perubahan di kawasan itu dan menentang campur tangan pihak luar terhadap urusan internal kawasan.

Para pemimpin OKI menyatakan mereka menyambut baik kerja sama yang diperlihatkan Baghdad terhadap Tim Pemeriksa Persenjataan PBB. Mereka juga mendukung seruan agar Tim Pemeriksa Persenjataan PBB diizinkan untuk melanjutkan pekerjaannya, di samping mendukung seruan agar upaya diplomasi untuk menyelesaikan krisis Irak diteruskan.

Perang bawa petaka

Menlu Hassan Wirajuda dalam pidatonya di KTT darurat OKI mengemukakan, Indonesia menolak serangan sepihak atas Irak yang hanya membawa konsekuensi bencana kemanusiaan. Ancaman dan aksi militer terhadap Irak hanya akan membawa petaka rakyat dan menimbulkan tragedi kemanusiaan.

Perang bukan solusi tetapi malah awal dari problema baru, baik politik maupun ekonomi, yang tidak hanya menimpa Irak, melainkan juga seluruh kawasan dan bahkan seluruh dunia.

"Karena itu, kami menyerukan Pemerintah Irak bekerja sama dengan Tim Pemeriksa Persenjataan PBB serta mematuhi secara penuh Resolusi 1441 DK PBB serta semua resolusi DK PBB lainnya yang terkait. Kami percaya bahwa bekerja sama dengan Tim Pemeriksa Persenjataan PBB secara lebih kuat dan dalam waktu yang memadai bisa menghasilkan sesuatu yang efektif," kata Hassan.

Ia mengemukakan, "Kepercayaan kami masih kuat bahwa kesepakatan soal senjata pemusnah massal Irak bisa dicapai melalui forum DK PBB sebagai bagian dari pelaksanaan mandat piagam PBB tentang perdamaian dan keamanan internasional."

Ditambahkan, "Indonesia konsisten menolak penyebaran senjata nuklir dan senjata pemusnah massal lainnya di kawasan ini maupun di kawasan lainnya."

Menyangkut pernyataan yang dikeluarkan KTT OKI, menurut Hassan, cukup mengalami kemajuan karena mencerminkan kebersamaan sesama anggota OKI itu sendiri. Ia mengakui, komunike KTT OKI kali ini memang mengandung elemen-elemen dari KTT GNB di Kuala Lumpur dan KTT Arab di S

Senada dengan Hassan, Emir Qatar Sheikh Hamad bin Khalifah Al Thani dalam pidato pembukaan acara tersebut menyatakan, ia menyambut baik kesediaan Irak menerima Resolusi 1441 DK PBB serta kerja samanya dengan Tim Pemeriksa Persenjataan PBB.

Sheikh Hamad juga menegaskan, harus menjaga kedaulatan, kesatuan dan keselamatan teritorial Irak serta tidak boleh turut campur urusan dalam negeri negara Irak.

Selain itu, ia mengingatkan, harus menghormati kedaulatan, keamanan, dan keselamatan teritorial Kuwait serta tidak ikut campur urusan dalam negeri

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : ...../...../.....
Hlm/Kolom : ...../.....
Sumber : Kompas / Pikiran Rakyat / .....
Penulis : .....
No_Klass/Subjek : ...../.....
.....

negara Kuwait.

"Pilihan kita sekarang tidak hanya mendukung antara solusi damai atau konfrontasi, tetapi apa yang bisa kita perbuat agar Irak bisa keluar dari krisis yang bisa menghindarkan kita dari harga yang sangat mahal, atau kerusakan dahsyat yang sulit tergantikan," kata Sheikh Hamad.

Sementara Sekjen OKI Abdelouahed Belkeziz mengatakan, suatu hal yang sangat berbahaya adalah bahwa AS dan Inggris tidak menghentikan ancamannya melancarkan serangan sepihak ke Irak jika mereka tidak memperoleh mandat dari DK PBB. "Jika hal itu terjadi, maka merupakan sebuah pelecehan dan pelanggaran atas asas legalitas internasional. Hal itu juga merupakan langkah pengabaian terhadap peran PBB dalam menyelesaikan suatu konflik yang akan membawa preseden buruk, serta menghancurkan tatanan hubungan internasional," kata Belkeziz.

Opini kita adalah misi Tim Pemeriksa Persenjataan PBB harus dilanjutkan hingga membuahkan suatu hasil dan tidak perlu lagi mengeluarkan resolusi baru. Apalagi pelaksanaan Resolusi 1441 DK PBB masih belum diberi waktu yang memadai," katanya.

Ribut Irak-Kuwait

Dalam acara itu sempat terjadi saling kutuk antara ketua delegasi Kuwait, Menlu Sheikh Sabah Ahmad Al Jabir Al Sabah, dan ketua delegasi Irak, Wakil Ketua Dewan Revolusi Izzat Ibrahim. Irak mendapat giliran pidato langsung setelah Kuwait. Ketua sidang Emir Qatar Sheikh Hamad bin Khalifah Al Thani terpaksa turun tangan untuk meredam ketegangan Kuwait-Irak tersebut.

Di antara isi pidato Kuwait yang membangkitkan kemarahan Irak adalah Sheikh Sabah menyatakan mendukung usulan Presiden Uni Emirat Arab (UEA) Sheikh Zaid bin Sultan yang meminta Saddam Hussein dan pimpinan Irak lainnya mundur. Ia juga menyerukan pimpinan Irak berpikir untuk bisa memberi pengorbanan besar yang sesuai dengan kapasitas tantangan yang dihadapi Irak dan kawasan Timur Tengah saat ini.

Menurut dia, apa yang diputuskan sejak pertemuan Gerakan Nonblok (GNB) di Kuala Lumpur dan KTT Arab di Sharm Al Sheikh hanya semakin menambah tersia-sianya waktu dalam upaya mencari solusi damai.

Tak pelak lagi, Ketua Delegasi Irak Izzat Ibrahim langsung berang dengan mengutuk AS dan antek-anteknya.

Menurut Ibrahim, bukan hanya tanah dan kekayaan Irak yang menjadi tujuan serangan AS ke Irak, tetapi juga seluruh umat Islam. Ia menyerukan KTT darurat OKI dapat mengeluarkan keputusan yang bantu memperkuat persatuan umat Islam dalam menghadapi tantangan mereka. (AFP/RIE)

BUTIR TERPENTING KOMUNIKE OKI:

- OKI menyambut baik keputusan Irak dalam menerima dan melaksanakan Resolusi 1441, serta meminta seluruh umat Islam mendukung upaya menghindari perang Irak dan mengharapkan kerja sama itu terus berlangsung ningga Tim PBB menuntaskan tugasnya.
- OKI menolak tegas setiap serangan ke Irak atau tindakan apa pun yang mengancam negara-negara Islam dan menekankan perlunya penyelesaian damai dalam konflik Irak.
- OKI menekankan perlunya integritas dan persatuan Irak dan seluruh negara tetangganya.
- OKI meminta seluruh negara Islam tidak melibatkan diri dalam tindakan militer yang akan mengancam keamanan dan integritas teritorial Irak serta negara Islam lain.
- OKI mendesak komunitas internasional melaksanakan pelucutan senjata massal di seluruh Timur Tengah, termasuk Israel.

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : KAMIS / 27 / FEBRUARI / 2003
Hlm/Kolom : 4 - / 3-6
Sumber : Kompas / Pikiran Rakyat /
Penulis : A'LA, AOD
No Klass/Subjek : DEMONSTRASI SERANGAN AMERIKA SERIKAT KE IRAK / 322.42

Signifikansi Penentangan Dunia atas Serangan AS ke Irak

UNJUK rasa global menentang rencana serangan Amerika Serikat (AS) ke Irak yang berlangsung 15 Februari 2003 lalu, memiliki makna yang amat signifikan dalam konteks pencerahan kehidupan umat manusia ke depan.

Penentangan masyarakat dunia terhadap rencana agresi AS ke Irak (yang didukung Inggris) itu memiliki peluang emas untuk merajut kembali tercerai-berainya umat manusia dalam satu altar kebersamaan menentang kebiadaban dan keangkaramurkaan.

Demonstrasi yang melibatkan sekitar 11,5 juta manusia di berbagai kota besar dunia itu memperlihatkan dengan transparan hilangnya sekat-sekat primordial dan sektarian yang membatasi mereka. Gerakan antikekerasan itu—sebagaimana diberitakan (*Kompas*, 17/2/03)—melibatkan manusia yang amat beragam dan dalam jumlah amat besar, sehingga menjadi suatu kejadian yang amat langka.

Dalam aksi itu sekitar 3000 orang Arab dan Yahudi bergandeng tangan bersama menyatakan protes terhadap rencana serangan AS ke Irak. Di Irlandia, warga Katolik dan Kristen—yang nyaris tidak pernah akur—bersatu menyuarakan penentangan terhadap perang. Demikian pula, di berbagai belahan dunia lain, umat Kristiani, umat Islam, dan penganut agama lain, bersama-sama menyuarakan hati nuraninya yang tulus, menolak perang dan aksi kekerasan.

Penolakan yang nyaris merepresentasikan manusia sejagad itu menjadi suatu momen yang benar-benar indah yang menggambarkan secara kental tercerahkannya nurani manusia dalam menyikapi kebiadaban dan kekerasan yang terus mengalami eskalasi cukup tajam dalam kehidupan kontemporer.

Kenyataan itu membuktikan, ketulusan nurani masih banyak dimiliki manusia yang direpresentasikan melalui sikap yang mencerminkan nilai-nilai kebaikan yang bersifat abadi. Dalam perennialisme ini tidak ada lagi yang dipertentangkan antara umat Islam dan umat Kristiani, sebagaimana tidak dipersoalkan antara Arab dan Yahudi, atau antara bangsa Irak dan bangsa Amerika. Para pengunjuk rasa dengan latar belakang yang amat beragam dari segi etnis, budaya, agama, dan bangsa itu, hanya memiliki satu komitmen tentang keharusan mengedepankan cara-cara damai daripada penggunaan kekerasan dalam menyelesaikan tiap persoalan yang menghadang manusia.

KESADARAN moral yang mempesona itu, senyatanya merupakan modal amat besar untuk pengembangan suatu tatanan kehidupan umat manusia yang baru; suatu kehidupan yang lebih damai dan sejahtera. Sebagai gerakan moral, unjuk rasa itu perlu dipahami sebagai kekuatan yang tidak berpihak kepada kepentingan tertentu, sekaligus tidak menyuarakan permusuhan terhadap bangsa atau kelompok mana pun.

AS dikutuk lebih karena kebijakan sang pemimpin yang telah melecehkan nilai-nilai moralitas universal. George W Bush terkesan kuat telah mereduksi AS ke dalam kepentingan sempit yang tidak mencerminkan kepentingan bangsa AS secara keseluruhan, apalagi kepentingan nilai-nilai kemanusiaan sejati.

Pada sisi itu pula, aksi protes perang tidak dapat direduksi sebagai kekuatan yang membela kepentingan Presiden Irak Saddam Hussein. Para pengunjuk rasa memprotes perang lebih sebagai ungkapan pembelaan mereka atas nilai-nilai moral yang dicabik-cabik oleh kekuatan tertentu, sehingga jika dibiarkan akan menjerumuskan manusia ke dalam malapetaka yang sangat mengerikan.

Mereka menentang perang karena serangan AS hanya akan membuat masyarakat tak berdosa di Irak menanggung akibat parah. Mereka kian akan terhunjam ke dalam derita dan kesengsaraan yang selama bertahun-tahun nyaris menjadi bagian dari kehidupan mereka.

Nilai-nilai moral semacam itu adalah visi yang melandasi gerakan. Karena itu, nilai-nilai itu perlu terus diaktualisasi dan dibumikan secara nyata, guna mengantarkan manusia dan masyarakat dunia menapaki kehidupan ke depan dengan penuh kedamaian. Para aktivis tidak dapat berhenti sekadar menentang penyerangan AS ke Irak semata. Mereka dituntut untuk mengembangkan terus kegiatan itu dengan cara mengkritisi segala kebijakan para penguasa dan rezim, termasuk Pemerintahan Saddam Hussein yang bertentangan dengan nilai dan moral kemanusiaan yang hakiki.

Upaya itu meniscayakan adanya langkah-langkah strategis yang dapat mengantar visi moral yang diemban para aktivis antiperang menjadi kekuatan sistematis yang transformatif melawan kekuasaan tiranik, biadab, dan anarkis. Gerakan moral ini, harus menjadi kekuatan alternatif yang dapat meredam atau minimal mengurangi aksi kekerasan dalam segala bentuknya yang kini merambah ke dalam kehidupan masyarakat di berbagai pelosok dunia.

Sebagai kekuatan yang terbebas dari kepentingan politik sempit dan pragmatis, gerakan antiperang dan antikekerasan dituntut memiliki kemampuan untuk menelanjangi praktik-praktik kotor terselubung yang sering mempermainkan retorika, sehingga kejahatan ditampakkan menjadi kebaikan atau sebaliknya. Dalam realitas kehidupan saat ini, kelompok tertentu atau rezim-rezim yang berkuasa sering memperalat demokrasi atau agama sekadar untuk kepentingan sendiri.

Bahasa dan formalitas demokrasi sering dijadikan jubah untuk menutupi kecurangan dan kebejatan. Demikian pula, agama dibiaskan sekadar sebagai media pencapaian kepentingan politik sektarian dan sejenisnya. Dalam konteks itu, gerakan antiperang perlu memunculkan diri sebagai pembebas dari upaya pembiasan semacam itu dan mengembalikan demokrasi atau agama kepada maknanya yang substansial.

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : ...../...../...../.....
Hlm/Kolom : ...../.....
Sumber : Kompas / Pikiran Rakyat / .....
Penulis : .....
No_Klass/Subjek : ...../.....
.....

PENCAPAIAN ke arah itu mensyaratkan gerakan itu tidak terperangkap ke dalam segala bentuk kemapanan dan formalitas sehingga kritisisme, dan ide-ide *transformatif akan* selalu menjadi karakter intrinsik yang menjadi roh segala aksi yang dikembangkan. Dengan misi transformatif yang diembannya, gerakan antikekerasan diharapkan selalu menyikapi secara kritis isu-isu kemanusiaan aktual yang berkembang dan meletakkannya sebagai fakta dan realitas yang membebaskan *manusia dari* keterkungkungan egoisme dan sejenisnya.

Pembebasan semacam itu, pada gilirannya perlu disebarkan ke masyarakat luas dengan mengembangkan pemahaman sebagai suatu aktivitas yang bersifat dialogis. Pola pemahaman ini—sebagaimana dinyatakan Gadamer (1989: 389)—pada prinsipnya identik *dengan* interpretasi, dan semua interpretasi terjadi dalam medium bahasa yang memungkinkan obyek dapat diungkapkan melalui kata, di mana pada saat yang sama, hal itu *merupakan* bahasa si penafsir sendiri.

Dalam ungkapan yang lain, pemahaman atas realitas tidak dapat dilepaskan dari unsur subyektivitas, *sehingga* manusia tidak akan pernah menggapai realitas atau kebenaran yang absolut.

Berdasar hal itu, *truth claim* dan pemaksaan dalam segala bentuknya merupakan *sesuatu* yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan fitrah manusia. Untuk menghindari hal itu, pemahaman—kata Gadamer (*1989: 304-306*)—selalu menuntut *historical horizon*. Setiap orang atau kelompok harus memiliki suatu horizon dalam rangka melakukan transposisi diri mereka ke dalam suatu *situasi dengan cara di mana* mereka harus membayangkan situasi yang lain, sekaligus membawa diri mereka ke dalam situasi itu. Dengan demikian, pemahaman selalu merupakan *fusion of horizon sehingga* tiap orang atau kelompok tidak dapat memonopoli kebenaran, sekaligus bisa bersikap terbuka terhadap kemungkinan makna lain yang ditawarkan kelompok lain.

Pemahaman dialogis menjadi mutlak untuk dikembangkan *dalam rangka mengantarkan* manusia terbiasa mendialogkan kebenaran yang dimiliki dengan realitas kehidupan atau "kebenaran lain" di sekitarnya.

Melalui pengembangan pemahaman semacam itu, tiap orang, kelompok, pemimpin, *atau siapa saja yang* bersikukuh dengan kebenaran sendiri dan menafikan kompleksitas realitas kehidupan, diharapkan lebih bersikap arif melalui kesiapan mereka untuk mendialogkan segala kebijakannya dengan kenyataan atau dengan kelompok *lain*.

Kalaupun mereka tidak bergeming dengan keyakinannya, masyarakat dunia yang telah memiliki pemahaman dialogis dapat menekan kelompok, rezim, atau penguasa yang angkuh dengan semacam sanksi atau hukuman moral yang diletakkan dalam kerangka nilai dan cara damai, sehingga menyadarkan mereka untuk kembali kepada nilai-nilai moralitas kemanusiaan yang agung.

Menyimpulkan paparan itu, aksi penentangan serangan AS ke Irak akan memiliki signi*fikansi yang tinggi bagi* kemanusiaan sejagad hanya jika gerakan itu benar-benar berjalan di atas jalur etika-moral yang luhur, dan menjadikan gerakan itu sebagai proses yang terus berkelanjutan. Gerakan itu tidak dapat berhenti pada sekadar memprotes rencana perang AS ke Irak, tetapi juga harus lebih menukik dengan mengkritisi segala kekerasan yang ada di berbagai belahan Bumi. Lebih dari itu, gerakan itu hendaknya dapat melakukan tekanan global yang akan membuat para pelaku kekerasan atau kejahatan menjadi sadar bahwa hakikat hidup adalah bagaimana "berbagi" dengan orang lain. Semua itu dilakukan dengan tetap mengedepankan cara-cara damai dan sejauh mungkin menghindari kekerasan.

ABD A'LA
Staf pengajar IAIN Sunan Ampel Surabaya, tinggal di Pesantren Annuqayah Sumenep

Perpustakaan Unikom
hlm. 137

Tanggal : 1 17 | 2 18 | 3 19 | 4 20 | 5 21 | 6 22 | 7 23 | 8 24 | 9 25 | 10 26 | 11 27 | 12 28 | 13 29 | 14 30 | 15 31 | 16
Hari /Bulan/ Tahun : SENIN / SEPTEMBER / 2001
Hlm/Kolom : 4 / 5-9
Sumber : Kompas / ~~Pikiran Rakyat~~ /
Penulis : HAPAR, Ivan A
Judul Artikel/ ~~Berita~~ : MEROSOTNYA Nilai Tukar Rupiah Dan Nasionalisme
SUBJEK THO KLASS : NASIONALISME / 320

Merosotnya Nilai Rupiah dan Nasionalisme

SOROTAN gejolak nilai tukar rupiah baru-baru ini di harian ini (*Tajuk Rencana, Kompas*, 1/9/01), patut disimak. Berbeda dengan analisis yang sudah sering kita dengar tentang adanya peningkatan permintaan dollar AS, ada hal lain disinyalir "lebih masuk akal" sebagai penyebab bergejolaknya kembali nilai tukar rupiah, yakni kesempatan mengambil keuntungan oleh mereka yang berkelebihan dana.

Siapa mereka, memang tidak secara gamblang diungkapkan. Namun, dari gambaran kasar pengumuman KPKPN (Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara) bisa diketahui, sebagian besar pejabat kita memiliki tabungan dollar AS dalam jumlah relatif besar. Mungkin, mereka termasuk yang memperoleh keuntungan dari gejolak rupiah. Konon, pihak lain lagi yang mungkin diuntungkan adalah perbankan itu sendiri, termasuk Bank Indonesia (BI). Meski ada beberapa alasan yang dianggap "wajar" bahwa siapa pun akan tergoda untuk ikut mengambil kesempatan memperoleh keuntungan besar. Tetapi, di balik kewajaran itu, ada pertanyaan menggugat diajukan, yaitu "apa yang didapat kita sebagai bangsa?".

Jawabannya jelas, hanya sebagian kecil dari 210 juta rakyat Indonesia. Lainnya, tidak memperoleh apa-apa, bahkan sebenarnya merugi. Pertanyaan berikut yang diajukan adalah, "Apakah kita akan terus berpikir untuk kepentingan sendiri-sendiri atau kita bersama-sama berusaha keluar dari berbagai kesulitan yang menimpa bangsa ini? Konon, sudah lama dirasakan, bangsa Indonesia kehilangan solidaritas sebagai bangsa. Kebersamaan terasa semakin hilang sejak beberapa dekade terakhir.

Memudarnya kebanggaan sebagai bangsa yang diikuti menguatnya sentimen kedaerahan dan primordialisme, sedikit-banyak disebabkan oleh kekecewaan sebagian besar anggota dan kelompok masyarakat bahwa kesepakatan bersama (*contract social*) yang mengandung nilai-nilai seperti keadilan sosial, perikemanusiaan, dan musyawarah sering kali sekadar menjadi retorika penguasa. Makin lama keadaan ini bertahan, "bangsa sebagai sesuatu yang ada dalam proses menjadi" makin tidak bermakna bagi mayoritas masyarakat. Nasionalisme yang spiritnya, seharusnya dibangun berdasar cita-cita bersama, menjadi kabur, interpretasi atasnya menjadi sepihak, monolitis dan—tak jarang—bersifat represif atas mereka yang berpenafsiran lain.

Boleh jadi, penyebab dari "berkurangnya rasa bangga sebagai bangsa", karena paradigma tentang bangsa dan nasionalisme yang kita anut, berjalan di tempat atau bahkan *out of date*. Padahal, perkembangan nasional dan global menuntut paradigma yang disesuaikan dari waktu ke waktu. Perdebatan tentang apa yang dimaksud dengan bangsa dan nasionalisme Indonesia, idealnya menjadi wacana umum bagi kita yang baru saja lepas dari rezim otoritarian dengan monopoli definisi tentang bangsa dan nasionalisme oleh penguasa.

◆◆◆

INDONESIA, seperti halnya negara bangsa lain, adalah sebuah proyek masa depan. Meminjam istilah Ben Anderson, Indonesia adalah sebuah *imagined communities* (komunitas terbayang). Konon, pada awal kelahiran Indonesia, wujud geografis masih menjadi perdebatan. Tergantung siapa yang membayangkan. Bung Karno misalnya, membayangkan Indonesia mencakup seluruh wilayah bekas jajahan Belanda. Hatta, "lebih bersahaja" dan, boleh jadi realistis, ketika membayangkan sebuah Indonesia federal tanpa Papua. Beda dengan Tan Malaka yang "ambisius" dengan proyek Maphilindo, mencakup Malaya dan Filipina. Paling tidak bagi para "separatis" Aceh, Papua dan Maluku Selatan dan sekian lainnya, daerah mereka bukan bagian Indonesia.

Dalam kata pengantar terjemahan buku Anderson yang peluncurannya dilakukan di Jakarta baru-baru ini, Daniel Dakhidae, juga mengungkapkan, menurut rencana, Jepang sebagai penguasa Nusantara, pada tahun 1945, tidak akan memerdekakan Indonesia seluruhnya, tetapi hanya Indonesia Barat. Sedangkan Indonesia Timur tetap dalam kekuasaan Angkatan Laut, sampai saat akan diputuskan lebih lanjut di kelak kemudian hari. Lalu, oleh Daniel, kita diajak berpolemik tentang "Apakah Indonesia itu harus satu? Apa yang memungkinkan kesatuan itu? Apakah Indonesia harus terpisah-pisah dan membuat Indonesia itu tidak ada lagi? Dan apa itu Indonesia pada akhirnya?" (hlm xxxiii).

Apakah, misalnya, fenomena disintegrasi bangsa saat ini, membenarkan apa yang diasumsikan, sebagai proyek masa depan, Indonesia bukan sesuatu yang *taken for granted* akan ada sepanjang masa. Sebagai sebuah proyek masa depan, Indonesia harus terus-menerus diisi, dibangun. Bagi Mochtar Pabottingi, pemerintahan saat ini berikut kabinetnya, "Membawa Harapan Baru" (*Kompas*, 10/8/2001). Mochtar mengajak, "Kita perlu membangun kembali negeri, bangsa, dan negara yang porak poranda." Presiden Megawati, diimbau meski dia adalah anak Soekarno, "tetapi dapat menjaga jarak dengan garis politik ayahnya, yakni dengan mengakomodasi dan terus memperjuangkan utuhnya kesatuan bangsa kita sambil menolak penafian Bung Karno atas lembaga-lembaga, proses, dan kaidah-kaidah demokrasi".

◆◆◆

PERTANYAAN yang perlu diajukan adalah, apa yang dimaksud dengan "bangsa" Indonesia? Bila ia adalah sesuatu yang terbayang (*imagined*), seperti yang diasumsikan Ben Anderson, apakah *claim* "kita"—yang berarti mengatasnamakan seluruh rakyat dalam komunitas bernama Indonesia saat ini—bisa dipertanggungjawabkan sebelum seluruh rakyat Indonesia diajak "membayangkan"? Tetapi, apakah benar bahwa asumsi Ben Anderson telah menebar kebingungan di kalangan akademik Indonesia, seperti "dituduhkan" Daniel Dakhidae? Salah satu jenis kebingungan, menurut Daniel, "bisa dilihat dengan jelas dalam pidato pengukuhan keprofesoran Dr Mochtar Pabottingi ketika dia membedakan antara bangsa (*people*) dan nasion (*nationa*) di mana bangsa adalah "kolektivitas sosiologis" dan nasion sebagai "kolektivitas politik". Mochtar, juga dianggap salah memahami asumsi Ben Anderson sehingga menolak definisi Ben Anderson tentang nasion.

Ben Anderson, dalam pengantar bukunya mengakui, kajian seputar nasionalisme sudah mengalami perubahan yang "mencengangkan", dalam metode, cakupan, kecanggihan, dan jumlahnya. Semua itu, berkat jangkauan sejarahnya dan

daya teoretisnya, membuat sebagian besar isi kepustakaan tradisional seputar paham kebangsaan jadi kuno. Karya-karya di seputar isu kebangsaan, telah ikut mendorong pertumbuhkembangan luar biasa kajian-kajian sejarah, kesusasteraan, antropologis, sosiologis, feminis, dan lain-lain yang mencantolkan obyek-obyek kajian masing-masing ke nasionalisme dan bangsa-bangsa.

◆◆◆

BERBAGAI pemikiran itu, tampaknya aktual dan relevan sebagai "acuan diskusi", baik bagi upaya "membangun kembali negeri, bangsa, dan negara yang porak-poranda" (Mochtar Pabottingi) atau dalam mempertanyakan keabsahan proyek Indonesia sebagai sebuah *imagined communities* yang harus dipertahankan dengan segala cara.

Timor Timur yang kini "lepas" dari Indonesia, Aceh dan Irian Jaya yang bergolak, kerusuhan horizontal yang telah memakan puluhan ribu korban di berbagai kawasan di Tanah Air, adalah "buah" dari kesepakatan tentang Indonesia sebagai bangsa, yang boleh jadi, belum tuntas didiskusikan. Hal ini, diperparah ulah sebagian elite bangsa, termasuk wakil rakyat yang tidak mempunyai *sense of crisis*. "Piknik" dengan alasan studi banding misalnya, adalah satu dari tak terbilang contoh terakhir yang menyinggung rasa keadilan dan memporakporandakan rasa kebersamaan. Dampaknya, bisa fatal. Karena, bisa memperlemah keinginan dan mengurangi rasa optimisme akan keberhasilan dari upaya sebagian masyarakat yang dengan tulus ingin berkorban untuk menyelamatkan bangsa ini.

◆ **Ivan A Hadar**, *Presiden IDE (Indonesian Institute for Democracy Education), Jakarta.*

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : RABU / 30 / MEI / 2001
Hlm/Kolom : 5 / 1-4
Sumber : Kompas / ~~Pikiran Rakyat~~ /
Penulis : ACHWAN, Rochman
Subjek : SOSIALISME / 320.53

Kecakapan Bermasyarakat

KECAKAPAN bermasyarakat *(sociability)*, konsep baru dalam ilmu sosial, kini menduduki tempat penting dalam program demokratisasi dan pembaruan ekonomi di banyak negara yang dilanda krisis. Dari Brasil (Abers, 1998) hingga Rusia (Dakhin, 2000), para akademisi dan perancang kebijakan publik meletakkan arti penting *sociability* sejajar dengan pembaruan institusi politik dan restrukturisasi ekonomi. Mereka (Fukuyama, 1995) malahan menyatakan bahwa kegagalan dan keberhasilan pembaruan politik dan ekonomi suatu negara akan *ditentukan oleh kekayaan* atau kekosongan *sociability* yang dimiliki oleh negara tersebut.

Apa sesungguhnya kecakapan bermasyarakat itu? Apa akibatnya bila suatu masyarakat atau negara tidak memiliki kecakapan bermasyarakat? Dan bagaimana membangun kecakapan *ini di Indonesia agar supaya* negeri ini dapat melepaskan diri dari krisis ekonomi yang terus membelit dan menuju demokratisasi yang sehat?

Infrastruktur sosial

Hampir 200 tahun yang lalu, Emile Durkheim, sosiolog Perancis, menyatakan pentingnya infrastruktur sosial sebagai medium untuk menjembatani perbedaan kepentingan antara negara dan warga negara. Karena kita sulit membayangkan keberhasilan seorang warga negara mendatangi parlemen dan kantor pemerintahan untuk memperjuangkan kepentingan diri mereka. Sungguh pun kepentingan itu merupakan refleksi kepentingan masyarakat. Sebaliknya, birokrasi negara akan mengalami kesulitan membangun hubungan dengan setiap warga negara bila masyarakat itu tidak memiliki infrastruktur sosial.

Infrastruktur ini bukanlah berwujud dalam jumlah puskesmas, sekolah dan pasar, melainkan *berbentuk perkumpulan* kemasyarakatan *(social voluntary associations)* yang ada di suatu masyarakat. Berbeda dengan RT, RW, Dharma Wanita ataupun koperasi yang merupakan perpanjangan tangan birokrasi pemerintahan di masa Orde Baru, perkumpulan ini muncul dan berkembang atas prakarsa anggota masyarakat sendiri tanpa campur tangan negara.

Dalam bukunya *Making Democracy Works*, yang kini menjadi "kitab suci" studi transisi demokrasi, Bob Putnam (1993), penasihat Presiden Clinton, mencetuskan gagasan yang patut kita renungkan. Ia menyatakan bahwa keberhasilan demokratisasi dan kemunculan kemakmuran di suatu negara bukanlah sepenuhnya ditentukan oleh berubahnya sistem politik dan ekonomi, melainkan oleh rangkaian panjang berkembangnya perkumpulan semacam ini.

Perkumpulan ini lahir atas prakarsa sejumlah warga negara setempat yang memiliki kecakapan bermasyarakat. Mereka *menggalang* kerja sama dengan anggota masyarakatnya untuk mendiskusikan dan melaksanakan pelbagai kegiatan yang menyangkut kebajikan dan peningkatan hajat hidup seluruh warga. Ada dua dimensi penting yang selalu melekat dalam konsep *sociability*.

Yang pertama adalah kebebasan individu dan, kedua, adalah tanggung jawab kemasyarakatan *(social responsibility)*. Seorang individu, kelompok ataupun institusi yang memiliki kecakapan bermasyarakat selalu menyeimbangkan kedua dimensi itu dalam sepak terjang kehidupan sehari-hari. *Dengan kata* lain, perkumpulan yang ditegakkan oleh kecakapan semacam ini selalu bersifat lintas etnik, agama dan kedaerahan.

Kesemarakan perkumpulan ini bukan hanya dapat menyederhanakan keruwetan kehidupan kemasyarakatan, melainkan juga dapat berfungsi sebagai "sekolah demokrasi" bagi anggotanya. Ide, kreativitas, dan kesegaran enerji lokal sering muncul sebagai daya untuk memecahkan persoalan yang dihadapi secara demokratis. Oleh karena itu, perkumpulan sering disebut sebagai *collective intelligence of society*. Sumbangan paling penting dari kemunculan perkumpulan ini adalah kemampuannya sebagai *detterance* dari setiap *provokasi ekonomi* dan politik yang dilakukan oleh para petualang politik.

Rangkaian perkumpulan semacam ini merupakan infrastruktur sosial paling berharga dan awal kemunculan masyarakat warga yang sehat *(healthy civil society)* dalam suatu negara *yang sedang melakukan* eksperimen demokratisasi. Transparansi dan akuntabilitas publik akan menjadi darah kehidupan bukan saja bagi komponen *civil society* namun juga partai politik, negara dan masyarakat bisnis. Karena semua makro institusi itu dipaksa mengembangkan prinsip *checks and balances* satu sama lain di arena publik.

Goon politics"

Rusia mulai menyadari akan pentingnya membangun infrastruktur sosial ini sebagai jalan keluar menyelamatkan kematan transisi ekonomi yang lah berjalan lebih dari satu dasawarsa. Sementara Brasil telah membangun infrastruktur ini semenjak tahun 1989. Di Indonesia, para politisi, teknokrat dan penentu kebijakan publik telah melupakan arti penting infra-ruktur ini sebagai jalan keluar emulihkan ekonomi dan men-)rong demokratisasi.

Para teknokrat dan penentu ebijakan mengalami kelum-hhan karena tidak memiliki pe-ikiran baru, terobosan baru, alam mengatasi kemiskinan ng semakin meluas di negeri i. *Sementara, kebanyakan* ha-a memiliki kepandaian me-elenggarakan munas, muktamar ataupun kongres untuk merebut posisi penting ditubuh partai. Mereka juga hanya memiliki kepandaian memperebutkan "kue" kekuasaan formal di saat negeri ini berada di tubir kebangkrutan ekonomi. *Bila partai* politik dapat diibaratkan sebagai *political mall*, pusat perbelan-an politik, maka sesungguhnya ereka tidak memiliki "barang-barang politik" yang dapat ditawarkan kepada masyarakat. Mereka tidak memiliki kebijakan, misalnya, mengenai bagaimana mendorong perkembangan industri kecil di Tanah Air.

Kelumpuhan teknokrat dan irokrasi serta pengabdian kebanyakan politisi terhadap krisis ekonomi telah membawa masyarakat Indonesia menjadi individu yang tidak memiliki kecakapan bermasyarakat. Mereka cenderung tidak mampu mengatasi belitan persoalan ekonomi yang menghadangnya. Dalam konteks kepolitikan dan kemasyarakatan seperti ini, *goon politics* muncul menjadi "mata uang" dalam transaksi politik sehari-hari. Istilah ini (Tornquist, 2000) menunjuk pada suatu keadaan di mana politisi ataupun pengusaha yang lahan kekuasaannya diganggu, dengan mudah memobilisasi sejumlah besar anggota masyarakat melakukan kekerasan kepada lawan politiknya. Hilangnya kecakapan bermasyarakat ini telah membawa arena publik Indonesia menjadi arena kekerasan baik yang bersifat ekspresif (tanpa tujuan) maupun instrumental (memiliki tujuan).

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : ...../...../...../.....
Hlm/Kolom : ...../.....
Sumber : Kompas / Pikiran Rakyat / .....
Penulis : .....
Subjek : .....

Dua contoh

Bagaimana, dan siapa yang memiliki kepedulian dalam, membangun kecakapan bermasyarakat? Berikut ini penulis akan membahas dua pengalaman berharga yang dapat dipertimbangkan oleh para pemimpin dalam membangun kecakapan ini. Pertama, pengalaman Gubernur Ali Sadikin dalam membangun LBH (Lembaga Bantuan Hukum) di Jakarta. Kedua, pengalaman pemerintah Provinsi Porto Alegre di Brasil dalam mendorong demokratisasi dan mengatasi kemiskinan.

Berbeda dengan pendahulu ataupun penggantinya, pada dasawarsa tahun 1970-an, dengan sangat kreatif Gubernur Ali Sadikin mendorong lahirnya LBH di Jakarta. Di saat kepolitikan sedang menuju ke puncak kediktatoran, Ali Sadikin memberi jalan sejumlah tokoh hak asasi manusia mendirikan perkumpulan ini. Tujuannya adalah membela hak-hak hukum golongan miskin dan memperjuangkan sistem hukum yang lebih adil. Gubernur Sadikin malahan meminta para pekerja hukum di LBH untuk menyeret dirinya atau aparatnya bila mereka melanggar hukum dalam menjalankan tugasnya.

Dewasa ini, lewat cabangnya di 14 provinsi di seluruh Tanah Air, YLBHI terus menerus mendorong golongan miskin mengorganisir diri untuk memperjuangkan kepentingannya dengan cara damai. Di samping itu, lewat perkumpulan ini telah lahir sejumlah pemimpin yang mampu memberi sumbangan konstruktif terhadap politik pembangunan hukum di Tanah Air. Tidaklah berlebihan bila kita menjuluki Ali Sadikin bukan saja sebagai bapak pendiri kecakapan bermasyarakat namun juga pendiri *civil society* di Jakarta.

Tahun 1989, gubernur reformis Porto Alegre, Brasil memperkenalkan kebijakan yang ia sebut sebagai *participatory budget policy*. Kebijakan ini, seperti diuraikan oleh Abbers (1998), bertujuan mengatasi kemiskinan sekaligus membangun kecakapan bermasyarakat antarwarga.

Sejumlah program sosial (pembangunan trotoar, jalan, kredit dan lain-lain) ditawarkan oleh pemda setempat kepada anggota masyarakat yang telah terhimpun kedalam perkumpulan yang mereka bangun sendiri.

Kebijakan ini bukan saja telah mendorong meningkatnya tanggung jawab warga dalam menangani program sosial ini, namun juga mendorong munculnya pelbagai macam perkumpulan yang dibentuk oleh masyarakat sendiri.

Dua pengalaman berharga tersebut mengajarkan kepada kita bahwa kekacauan, kekerasan dan kemiskinan yang ada di depan mata kita sesungguhnya dapat diberantas bila para pemimpin memiliki kreativitas dalam membangun pelbagai macam kecakapan bermasyarakat. Semaraknya bentuk kecakapan ini akan mendorong cepatnya pemulihan ekonomi dan proses demokratisasi yang sehat.

◆ **Rochman Achwan**, *sosiolog, dosen FISIP-UI.*

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : KAMIS / 17 / MEI / 2001
Hlm/Kolom : 4 / 5-9
Sumber : Kompas / ~~Pikiran Rakyat~~ / .....
Penulis : RUSLANI
Subjek : ORISTOFRASI | 321
| NO. KLASS

Dialog dan Rekonsiliasi Mestinya Berangkat dari Otokritik

BILA kita mau jujur, sebenarnya elite politik bangsa ini masih berputar-putar pada persoalan ideologis dan fanatisme golongan yang bercampur dengan "dendam" politik. Masing-masing elite berusaha merangkul aliansi sebanyak-banyaknya dalam rangka menjatuhkan pihak lain yang dianggap sebagai lawan kuat, tetapi kemudian aliansi ini akan berantakan kembali ketika kepentingan-kepentingan kelompok yang beraliansi tidak terakomodasi lagi.

Hal ini tampak jelas pada Sidang Umum MPR Oktober 1999 untuk menentukan siapa presiden kita. Poros Tengah dengan merangkul Abdurrahman Wahid (Gus Dur) untuk dicalonkan menjadi presiden *vis-a-vis* Megawati Soekarnoputri. Saat itu, mungkin merupakan pilihan paling logis memilih Gus Dur karena hampir tidak ada tokoh politik lain yang memiliki karisma seperti Megawati selain Gus Dur. Artinya, Gus Dur dicalonkan sebagai presiden pada saat itu bisa ditafsirkan sebagai upaya untuk menjegal Megawati agar tidak jadi presiden.

Namun, yang terjadi kini sebaliknya: kelompok-kelompok yang dulunya mendukung Gus Dur sebagai presiden, kini berbalik ingin menjatuhkan Gus Dur dengan menggunakan justifikasi-justifikasi politis yang sering mengada-ada. Bahkan yang lebih lucu lagi, pihak-pihak yang dulu *ngotot* berpendapat bahwa dalam Islam tidak diperbolehkan seorang perempuan menjadi presiden, kini dengan lantang mengatakan, "kini telah ada perubahan pemikiran sehingga tidak ada masalah seorang perempuan untuk menjadi presiden."

Padahal, perdebatan mengenai boleh-tidaknya seorang perempuan menjadi presiden, bukan hal yang sangat signifikan karena yang paling penting adalah komitmen seorang pemimpin terhadap nasib bangsa dan [illegible] yang dipimpinnya. Nyaris dalam setiap komentar maupun ungkapan para elite politik saat ini sarat dengan kepentingan yang ingin menunjukkan bahwa kelompoknyalah yang paling baik dan mewakili rakyat Indonesia sehingga ia berhak menentukan segala-galanya. Tidak pernah ada upaya dari para elite untuk berdialog secara terbuka tanpa membawa prasangka-prasangka sebelumnya untuk mencari sebuah alternatif pemecahan yang disepakati bersama dan demi kepentingan bangsa.

Setiap ucapan elite yang mengatakan "demi bangsa" agaknya sudah terdistorsi maknanya saat tidak bisa lagi melihat persoalan secara obyektif mereka cenderung *sudah* memiliki [illegible] lain benar-salah sebelum mereka menyelidiki maupun memahami persoalan secara lebih jelas dan gamblang. Bahkan, yang lebih parah, isu-isu kerusuhan dan konflik sering dijadikan komoditas politik untuk menjatuhkan lawan-lawan politik.

◆◆◆

PARTAI politik dan golongan—bagi sebagian besar elite politik dan masyarakat kita—agaknya sudah beralih fungsi menjadi "agama". Karena fanatisme kepada partai atau golongan tertentu sudah sedemikian hebatnya sehingga bisa diidentikkan dengan fanatisme agama. Dalam agama, fanatisme itu muncul setidaknya karena tiga hal.

Pertama, karena faktor ideologis, yaitu penafsiran religi terhadap relasi-relasi sosial. Agama menjadi perekat suatu masyarakat atau kelompok sosial karena memberi kerangka penafsiran dan pemaknaan bagi hubungan-hubungan sosial. Ini juga berlaku bagi partai dan kelompok politik di Indonesia. Artinya, partai politik sering melakukan penafsiran politis terhadap relasi-relasi sosial dan menganggap bahwa partai bisa menjadi perekat suatu kelompok masyarakat karena memberi kerangka penafsiran dan pemaknaan tertentu bagi hubungan-hubungan sosial.

Kedua, [illegible] relasi sosial. Orang memeluk agama tertentu berarti menjadi milik suatu kelompok sosial tertentu. Kemudian kepemilikan ini memberikan stabilitas sosial, status, cara berpikir, dan etos tertentu. Persoalan ini menjadi lebih kuat lagi bila dikaitkan dengan identitas etnis dan kultural suatu kelompok sosial. Dalam partai, orang menjadi anggota partai berarti ia menjadi "milik" partai bersangkutan. Seringkali karena pandangan ini, para pemimpin maupun partisan partai dengan "senang [illegible] melakukan pertikaian dan [illegible] dengan partai lain [illegible] partainya.

Ketiga, legitimasi etis. Suatu sistem pemikiran mendapat du[illegible] agama. Artinya, kon[illegible]sep-konsep atau wacana tertentu yang ada di masyarakat, misalnya, tentang demokrasi, kesetaraan jender, keadilan sosial, dan lainnya, sering diklaim sebagai berasal dari agama atau kitab suci agama tertentu. Dengan klaim ini, umat beragama sering lupa, mungkin umat beragama lain pun memiliki klaim yang sama. Dari pemimpin dan elite partai, kita sudah terlalu sering mendengar, "partai kami adalah partai terbuka dan demokratis, kami bersedia dikritik dan di ini, itu, asal semuanya berdasarkan fakta dan argumentasi yang valid dan dilakukan demi kebaikan bersama."

Namun kenyataannya, jarang sekali ada partai yang benar-benar terbuka. Jarang sekali ada tokoh partai atau organisasi tertentu yang bisa mengambil jarak dengan partai atau organisasinya. Padahal, ketidakmampuan mengambil jarak inilah yang menjadi salah satu sumber tumpulnya daya nalar dan daya kritis kita. Kita sering lupa bahwa kita adalah juga manusia yang sama dengan manusia lain, meski ia tidak separtai dengan saya.

Elite bangsa kita agaknya belum mampu mengadakan dialog terbuka untuk mengkritisi diri masing-masing kemudian bercermin dengan cermin rakyat kebanyakan: siapakah mereka sesungguhnya. Cermin yang sering kita gunakan untuk berkaca adalah cermin kita sendiri, cermin subyektivitas kita, cermin yang tidak mampu menampilkan gambaran diri kita yang

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : ...../...../...../.....
Hlm/Kolom : ...../.....
Sumber : Kompas / Pikiran Rakyat / .....
Penulis : .....
Subjek : .....

sejati. Kalaupun cermin itu mengungkapkan diri kita yang sejati, jarang di antara kita ada yang mau mengakuinya, bahkan seringkali kita berusaha untuk menutupinya dengan retorika dan ungkapan-ungkapan canggih yang membuat rakyat semakin kebingungan.

◆◆◆

"BAGAIMANAKAH kita bisa mengambil jarak dengan kelompok kita sendiri?," tampaknya merupakan persoalan yang patut menjadi renungan kita bersama agar proses dialogis bangsa ini bisa berjalan pada koridor yang semestinya, agar bangsa kita tidak lagi menjadi bangsa yang suka adu otot, tetapi lebih menjadi bangsa madani yang cerdas, yang lebih banyak menyelesaikan persoalan dengan akal sehat ketimbang dengan menghancurkan kelompok lain.

Dalam hermeneutika Paul Ricoeur, proses distansiasi atau pengambilan jarak bisa dilakukan melalui tiga hal.

Pertama, dekonstruksi. Dengan dekonstruksi kita akan berusaha membongkar pemahaman-pemahaman lama kita tentang siapa diri kita, apa kelompok kita, dan siapa orang/kelompok selain kita.

Dekonstruksi ini diterapkan ke dalam berbagai realitas, kepentingan dan ideologi melalui pemisahan hubungan monolinier antara realitas, kepentingan, atau ideologi tertentu dengan tafsirnya. Keyakinan bahwa ada hubungan final antara suatu realitas dengan tafsir tertentu harus dibongkar, karena keyakinan semacam ini akan menimbulkan berbagai dampak negatif.

Pertama, fanatisme terhadap tafsir tertentu serta menolak keabsahan tafsir lain.

Kedua, akan menutup kemungkinan terbukanya realitas terhadap berbagai penafsiran. Dengan tertutupnya keragaman tafsir, maka sebuah realitas akan mengalami semacam "pembusukan".

Ketiga, suatu realitas yang telah dibungkam melalui peresmian satu tafsir saja, akan menyebabkan realitas itu tak bermakna lagi dalam menghadapi derasnya perubahan sosial pada zaman modern sekarang ini.

Dekonstruksi terhadap pemahaman suatu realitas, berarti membuka kemungkinan terhadap keragaman tafsir atas realitas. Sebab, hubungan yang linear dan final antara realitas dengan tafsirnya telah putus.

Dekonstruksi juga membawa konsekuensi lain yang lebih bersifat sosiologis, yakni berusaha menghapus monopoli tafsir pada otoritas tertentu yang berbicara mengenai "kebenaran tunggal" atas nama Tuhan, negara, dan penguasa, sehingga tafsir menjadi sesuatu yang relatif "demokratis" dalam pengertian adanya kemungkinan bahwa kebenaran tidaklah menjadi monopoli satu tafsir tertentu.

Kedua, kritik ideologi. Istilah "ideologi" diciptakan Destutt de Tracy untuk mendefinisikan maksud-maksud utama sains yang bertujuan memahami berbagai gagasan, karakteristik-karakteristik dan hukum-hukumnya serta hubungannya dengan tanda-tanda yang merepresentasikannya. Ia berupaya merepresentasikan sebuah dunia yang licik, yang memaksakan pandangan dunia kelas sosial dominan terhadap kelas-kelas yang lebih rendah.

Menurut sudut pandang Ricoeur, adalah mungkin bagi kita untuk menyadari bahwa ini merupakan pandangan yang sangat picik tentang ideologi yang hanya menekankan sisi negatifnya. Padahal, ideologi bukan hanya bersifat distortif terhadap realitas sosial, ia juga terkait dengan kuasa masyarakat dan integrasi, yang dalam kenyataannya mampu mengubah cara pemahaman kita terhadap dunia. Ideologi adalah sebuah persoalan tanpa akhir dan tak pernah bisa dipecahkan karena tidak ada ruang non-ideologis yang bisa digunakan untuk memulai diskusi tentang ideologi.

Fenomena ideologis muncul dalam sebuah masyarakat pasca-industrial dalam hal yang berkaitan dengan disimulasi realitas. Konflik-konflik utama dalam masyarakat itu yang berupaya untuk memberikan jawaban-jawaban bagi perdebatan nasional merupakan akibat dari kondisi tentang ilusi ini. Di Indonesia, kita telah menyaksikan konflik-konflik di kalangan elite politik yang disulut ideologi-ideologi yang berusaha menyelamatkan isu untuk mempertahankan status masyarakat pasca-industrial.

Karena itu, agaknya bangsa kita, terutama elite politiknya, perlu menengok konsep "**rehabilitasi ideologis" dari Ricoeur. Ricoeur berpendapat, ideologi ternyata bukanlah hal yang negatif sama sekali, ia mulai membahas** persoalan ideologi dengan sebuah makna yang jelas untuk mendeduksi makna fundamental dari ideologi. Ia menekankan adanya tiga fungsi ideologi: (1), dismulasi realitas; (2) legitimasi berbagai otoritas; dan (3) integrasi sosial.

Analisis dalam konsep Ricoeur dimulai dari Marx, yaitu konsepsi yang paling umum dan paling jelas tentang fenomena ideologis: disimulasi realitas yang memperhitungkan pertentangan antara ideologi (*ideal plan*) dan praksis (*real plan*). Ia juga mengadopsi konsep pendekatan struktural Althusser mengenai Marxisme yang menyatakan adanya pertentangan lain, antara sains dan ideologi.

Sebagai titik balik atas pencarian ini, Ricoeur juga memperhitungkan pendekatan Mannhein berkenaan dengan fenomena itu untuk menunjukkan bahwa tidak ada ruang yang netral ilmiah untuk mendiskusikan konsep ideologi. Karena itu, kita sebenarnya tidak mampu memisahkan sains dari ideologi dan pengetahuan utama tentang realitas jelas sekali dipengaruhi oleh ideologi.

Dari Weber, Ricoeur berupaya menemukan jalan baru untuk memahami fenomena ideologis dengan menunjukkan konsep kedua tentang ideologi: legitimasi otoritas. Ada sebuah perbedaan antara maksud-maksud dari mereka yang memegang kekuasaan dan legitimasi otoritas, yang menurut Ricoeur, inilah yang disebut *plus-valour* politik. Ideologi menyembunyikan perbedaan ini.

Dengan mengikuti analisis Ricoeur, maka sangat penting untuk mengkritisi konsep-konsep ideologi karena alasan bahwa konsep-konsep ini senantiasa terkait dengan kekuasaan.

Setelah melakukan berbagai kritik ideologi, Ricoeur akhirnya menunjukkan karakteristik ketiga dari ideologi: integrasi masyarakat. Di balik disimulasi dan letigimasi, ideologi juga memiliki fungsi untuk memelihara identitas dan integrasi kelompok dalam masyarakat.

Menurut Ricoeur, ada sebuah relasi dialektis antara sains-sains dan ideologi, sehingga setiap upaya untuk memisahkannya adalah sia-sia. Ada juga kaitan antara ideologi dan konflik-konflik masyarakat kontemporer yang menunjukkan adanya keharusan untuk dilakukannya pendekatan-pendekatan baru untuk menengahi konflik-konflik itu dalam masyarakat. Dengan memperhatikan ketiga karakteristik dan fungsi ideologi seperti yang ditunjukkan Ricoeur, semoga elite politik kita bersedia menjadikan ideologi mereka sebagai upaya untuk menjembatani berbagai konflik kepentingan di antara mereka sendiri maupun konflik horizontal dalam masyarakat menuju integrasi masyarakat Indonesia.

Ketiga, analogi permainan. Yang dimaksud dengan analogi permainan di sini adalah sebuah permainan yang diadakan sebagai arena untuk mempertemukan pihak-pihak yang berkonflik dengan terlebih dahulu melepaskan klaim-klaim primordialnya yang sempit guna mengikuti permainan tertentu yang bebas untuk siapa saja dan ditonton oleh siapa saja. Karena dalam permainan, orang biasa-

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : ...../...../...../.....
Hlm/Kolom : ...../.....
Sumber : Kompas / Pikiran Rakyat / .....
Penulis : .....
Subjek : .....

nya bisa melupakan sejenak "identitas primordialnya" masing-masing. Ia akan lupa apa partainya, apa pangkatnya, apa agamanya, apa sukunya, dan apa ideologinya.

Dengan cara ini, diharapkan ketika kita sudah keluar dari permainan, akan timbul kesadaran bahwa ternyata kita mampu melepaskan klaim-klaim eksklusif atas diri kita yang membuat kita sering kali tidak toleran terhadap pihak lain. Dengan kesadaran ini, diharapkan pula bangsa kita bisa melakukan dialog dan rekonsiliasi tanpa harus membawa kepentingan-kepentingan kelompok atau pribadi yang memang sudah saatnya disubordinasikan di bawah kepentingan bangsa dan negara yang kini tengah sekarat menunggu kesadaran kita untuk bangkit bersama-sama bergandengan tangan dalam suasana tenang dan demokratis, tanpa saling tuduh, tanpa saling curiga, tanpa saling bunuh, dan tanpa saling menjatuhkan.

◆ **Ruslani**, editor-in-chief *penerbit Qalam, mahasiswa Program Magister Ilmu Religi dan Budaya, Universitas Sanata Dharma; dan staf pengajar Sekolah Tinggi Seminari St Paulus, Yogyakarta.*